



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LAPORAN KEUANGAN

T.A. 2025

BADAN PENDAPATAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Per 31 Desember 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 24 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
II. NERACA	3
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE).....	9
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)	11
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	14
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	15
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	17
2.1 Kebijakan Keuangan	17
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	22
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	22
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	24
4.1 Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	24
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25

4.3	Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	25
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	29
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN		43
5.1	Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	43
5.2	Penjelasan Pos-pos Neraca.....	54
5.3	Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	64
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas	75
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN.....		77
6.1	Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah	77
6.2	Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	77
BAB VII PENUTUP.....		79
LAMPIRAN.....		80

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025	17
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.....	19
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Bapenda Tahun 2025.....	20
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	22
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	43
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	42
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah.....	46
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	46
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ..	47
Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	48
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	49
Tabel 5.8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai	49
Tabel 5.9 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	51
Tabel 5.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	52
Tabel 5.11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	52
Tabel 5.12 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA.....	53
Tabel 5.13 Rincian Aset	54
Tabel 5.14 Rincian Aset Lancar	54
Tabel 5.15 Rincian Kas dan Setara Kas.....	55
Tabel 5.17 Rincian Piutang Pendapatan	55
Tabel 5.18 Daftar Piutang Pajak Daerah	55
Tabel 5.19 Daftar Piutang Retribusi	56
Tabel 5.20 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	56
Tabel 5.21 Persediaan.....	57
Tabel 5.22 Daftar Nilai Aset Tetap.....	57
Tabel 5.23 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	58

Tabel 5.24 Aset Tetap Peralatan dan Mesin	58
Tabel 5.25 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025	59
Tabel 5.26 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	59
Tabel 5.27 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	59
Tabel 5.28 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	60
Tabel 5.30 Aset Tetap Lainnya	61
Tabel 5.31 Rincian Kewajiban	61
Tabel 5.32 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	62
Tabel 5.33 Pendapatan Diterima Dimuka	62
Tabel 5.34 Rincian Utang Belanja	62
Tabel 5.35 Rincian Utang Belanja Pegawai	62
Tabel 5.36 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	63
Tabel 5.37 Rincian Pendapatan - LO	64
Tabel 5.38 Pendapatan Asli Daerah – LO	64
Tabel 5.39 Rincian Pendapatan Asli Daerah	65
Tabel 5.40 Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO	66
Tabel 5.41 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO	67
Tabel 5.42 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO	67
Tabel 5.43 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO	68
Tabel 5.44 Rincian Beban	68
Tabel 5.45 Rincian Beban Operasional	69
Tabel 5.46 Rincian Beban Pegawai	69
Tabel 5.47 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	70
Tabel 5.48 Rincian Beban Barang dan Jasa	70
Tabel 5.50 Rincian Beban Penyisihan	71
Tabel 5.51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	72
Tabel 5.52 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	72
Tabel 5.53 Rincian Surplus Non Operasional	72
Tabel 5.55 Rincian Beban Luar Biasa	73

Tabel 5.56 Rincian Surplus/(Defisit) – LO.....	73
Tabel 5.57 Ekuitas Awal - LO.....	75
Tabel 5.58 Surplus/(Defisit)-LO.....	75
Tabel 5.59 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan	
Mendasar	76
Tabel 5.60 Koreksi Ekuitas Aset Tetap	76
Tabel 5.61 Rincian Ekuitas Akhir	76

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
- Lampiran 2 : Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025
- Lampiran 3 : Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
- Lampiran 4 : Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2025
- Lampiran 5 : Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
- Lampiran 6 : Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2025
- Lampiran 7 : Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
- Lampiran 8 : Kertas Kerja Laporan Operasional



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK T ENGAH**

Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = \frac{(4/3) \times 100}{}$	6
4	PENDAPATAN DAERAH	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
4.1.01	Pajak Daerah	276,329,157,274.00	327,500,641,030.22	118.51	182,328,157,865.50
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	975,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	5,284,027,968.51	0,00	1,531,604,620.62
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
	JUMLAH PENDAPATAN	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
5	BELANJA DAERAH	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17,256,034,294.00
5.1	BELANJA OPERASI	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16,561,653,444.00
5.1.01	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35	14,447,736,632.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	85.89	2,113,916,812.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16,561,653,444.00
5.2	BELANJA MODAL	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694,380,850.00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56	694,380,850.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694,380,850.00
	JUMLAH BELANJA	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17,256,034,294.00
	SURPLUS/DEFISIT	245,870,283,108.58	307,132,862,988.73	124.91	166,604,703,192.12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	245,870,283,108.58	307,132,862,988.73	124.91	166,604,703,192.12

24

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Badan Pendapatan Daerah

NERACA

Per 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Neraca
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	372.839.259.563,82	371.803.154.702,18
1.1	ASET LANCAR	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35
1.1.01	Kas dan Setara Kas	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	91,559,127,521.07	86,378,017,612.07
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1,713,434,474.33	1,713,434,474.33
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96,065,539.74	96,065,539.74
1.1.09	Piutang Lainnya	0,00	0,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(59,287,152,699.43)	(53,499,211,507.03)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	274,553,689.00	285,282,259.00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	(140.524.250.796,61)	166.608.612.192,12
	JUMLAH ASET LANCAR	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35
1.3	ASET TETAP	5.154.624.050,15	3.500.959.335,11
1.3.01	Tanah	400,000,000.00	400,000,000.00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8,389,236,930.55	6,283,718,804.23
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3,428,548,378.00	3,032,648,378.00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	284,666,000.00	284,666,000.00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.347.827.258,40)	(6.500.073.847,12)
	JUMLAH ASET TETAP	5.154.624.050,15	3.500.959.335,11
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	111,382,604.72	111,382,604.72
1.5.03	Aset Tidak Berwujud		
1.5.04	Aset Lain-lain	111,382,604.72	111,382,604.72
	JUMLAH ASET LAINNYA	111,382,604.72	111,382,604.72
	JUMLAH ASET	372.839.259.563,82	371.803.154.702,18
2	KEWAJIBAN	2,408,526.00	597,017,270.00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,408,526.00	597,017,270.00
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	425,538,068.00
2.1.06	Utang Belanja	2,408,526.00	171,479,202.00

	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,408,526.00	597,017,270.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2,408,526.00	597,017,270.00
3	EKUITAS	39,619,969,325.98	37,988,913,047.94
3.1	EKUITAS	39,619,969,325.98	37,988,913,047.94
3.1.01	Ekuitas	39,619,969,325.98	37,988,913,047.94
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
	JUMLAH EKUITAS	39,619,969,325.98	37,988,913,047.94
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	39,622,377,851.98	38,585,930,317.94

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

KODE REKENING	URAIAN	2025	2024	KENAIKAN / PENURUNAN	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	338,391,316,975.73	192,214,143,113.37	146,177,173,862.36	76.05
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	338,391,316,975.73	192,214,143,113.37	146,177,173,862.36	76.05
7.1.01	Pajak Daerah-LO	333,107,289,007.22	190,681,563,492.75	142,425,725,514.47	74.69
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	975,000.00	(975,000.00)	(100.00)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	338,391,316,975.73	192,214,143,113.37	146,177,173,862.36	76.05
	JUMLAH PENDAPATAN	338,391,316,975.73	192,214,143,113.37	146,177,173,862.36	76.05
8	BEBAN	29,627,167,507.56	28,228,430,525.00	1,398,736,982.56	4.96
8.1	BEBAN OPERASI	28,660,985,799.40	27,885,738,838.00	775,246,961.40	2.78
8.1.01	Beban Pegawai	18,663,896,410.00	12,916,639,005.00	5,747,257,405.00	44.49
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4,209,035,726.00	2,120,269,897.00	2,088,765,829.00	98.51
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5,788,053,663.40	12,848,829,936.00	(7,060,776,272.60)	(54.95)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	28,660,985,799.40	27,885,738,838.00	775,246,961.40	2.78
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	966,181,708.16	342,691,687.00	623,490,021.16	181.94
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	896,830,596.39	283,909,894.00	612,920,702.39	215.89
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62,004,461.77	51,410,550.00	10,593,911.77	20.61
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7,346,650.00	7,371,243.00	(24,593.00)	(0.33)
8.1.08.09	Beban Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	966,181,708.16	342,691,687.00	623,490,021.16	181.94
	JUMLAH BEBAN	29,627,167,507.56	28,228,430,525.00	1,398,736,982.56	4.96
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	308,764,149,468.17	163,985,712,588.37	144,778,436,879.80	88.29
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	112,471.00	576,677,888.48	(576,565,417.48)	(99.98)
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	112,471.00	576,677,888.48	(576,565,417.48)	(99.98)
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	112,471.00	576,677,888.48	(576,565,417.48)	(99.98)
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	112,471.00	576,677,888.48	(576,565,417.48)	(99.98)

	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	308,764,261,939.17	164,562,390,476.85	144,201,871,462.32	87.63

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025



**PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	37,988,913,047.94	40,035,134,763.21
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	308,764,261,939.17	164,562,390,476.85
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(342,672.40)	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(342,672.40)	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
RK PPKD	(307,132,862,988.73)	(166,608,612,192.12)
EKUITAS AKHIR	39,619,969,325.98	37,988,913,047.94

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2025

BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.
- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2024 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan	255.589.622.349,00	276,329,157,274.00	20,739,534,925.00	8.11
1	Pendapatan Asli Daerah	255.589.622.349,00	276,329,157,274.00	20,739,534,925.00	8.11
	Pajak Daerah	255.589.622.349,00	276,329,157,274.00	20,739,534,925.00	8.11
	Jumlah Pendapatan	255.589.622.349,00	276,329,157,274.00	20,739,534,925.00	8.11
II	Belanja	27.324.591.104,10	30,458,874,165.42	3,134,283,061.32	11.47
1	Belanja Operasi	25.111.318.240,10	27,755,464,241.42	2,644,146,001.32	10.53
	Belanja Pegawai	21.770.856.713,10	22,868,025,288.42	1,097,168,575.32	5.04
	Belanja Barang dan Jasa	3.340.461.527,00	4,887,438,953.00	1,546,977,426.00	46.31
2	Belanja Modal	2.213.272.864,00	2,703,409,924.00	490,137,060.00	22.15
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.813.386.744,00	2,291,384,604.00	477,997,860.00	26.36
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.886.120,00	412,025,320.00	12,139,200.00	3.04
	Jumlah Belanja	27.324.591.104,10	30,458,874,165.42	3,134,283,061.32	11.47
	Deficit/Surplus	228.265.031.244,90	245,870,283,108.58	17,605,251,863.68	7.71

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sektor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Memberdayakan Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan sebagai pengganti sedahan untuk melakukan pemungutan PBB-P2 di wilayah masing-masing.
 - b. Membentuk tim satgas MBLB dan Satgas PAD untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan pajak daerah.
 - c. Melakukan sinkronisasi dan pengecekan data dengan data pada OSS DPMPTSP.
 - d. Melakukan penilaian masal data Objek Pajak PBBP2 di 8 Desa dan Kelurahan dan penilaian individual untuk 15 objek pajak daerah.
 - e. Membagi seluruh bidang dan sekretariat lingkup Bapenda untuk mengkoordinir pengelolaan pajak daerah di masing-masing kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Melakukan MOU pembayaran online pajak daerah dengan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri.
 - b. Memfasilitasi Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan secara bertahap mini printer bluetooth untuk kemudahan pembayaran PBB-P2.
 - c. Tidak menarik insentif yang tidak banyak memiliki aktifitas pengelolaan pendapatan daerah seperti Pajak Opsen BBNKB.

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

 - a. Kurangnya ketersediaan SDM pegawai Bapenda yang mengelola objek pajak. Jumlah SDM Bapenda tidak sebanding dengan potensi objek pajak yang dikelola.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Tujuan Program ini meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan realisasi penerimaan PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran senilai Rp. 3.399.044.647,00 Anggaran terealisasi senilai Rp. 2.989.151.993,00 atau 87,94%
- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Program ini mendukung peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pertumbuhan realisasi PAD. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan ini 6 (enam) kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 27.059.829.518,42 terealisasi senilai Rp. 22.662.654.017,00 atau 83,75%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan			
1	PAD	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43
	Jumlah Pendapatan	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43
II	Belanja			
1	Belanja Operasi	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97
1.1	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35
1.2	Belanja Barang dan Jasa	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	85.89
2	Belanja Modal	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99
	Jumlah Belanja	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatkan realisasi penerimaan PAD	100%		
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Input : 3.399.044.647,00 Output : Outcome : Persentase tata Kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolalan pendapatan	100% 100% 100%	2.989.151.993,00	87.94
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	B Predikat		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input : Rp. 178.690.630,00 Output : Outcome : Dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100% 33 dokumen	Rp. 113.129.528,00	63.31
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : Rp. 22.890.346.038,42 Output : Outcome : Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	 23 dokumen	Rp. 18.855.702.946,00	82.37
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Input : Rp. 2.056.926.832,00 Output :		Rp. 1.931.998.768.00	93,93

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Outcome : Laporan administrasi umum perangkat daerah	9 laporan		
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Rp. 1.126.636.404,00	100%	Rp. 1.083.600.000,00	96.18
		Output :			
		Outcome : Persentase layanan pemerintahan daerah	100%		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Input : Rp. 137.810.064,00	100%	Rp. 54.602.424,00	
		Output :			
		Outcome : Persentase layanan pemerintahan daerah	100%		39.62
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Input : Rp. 669.419.550,00	100%	Rp. - Rp. 623.620.351,00	
		Output :			
		Outcome : persentase barang milik daerah kondisi baik	100%		93.16

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2025	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Anggaran	Tahun 2024
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	Pendapatan Asli Daerah					
1	Pajak Daerah	276,329,157,274.00	327,500,641,030.22	182,328,157,865.50	118.51	100,48
2	Retribusi Daerah			975.000,00		
3	Lain-Lain PAD Yang sah		5,284,027,968.51	1.531.604.620,62		
	Jumlah Pendapatan	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	183.860.737.486,12	120.43	101,32
B	BELANJA					
1	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	14.447.736.632,00	82.35	79,34
2	Belanja Barang & Jasa	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	2.113.916.812,00	85.89	82,93
3	Belanja Modal	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	694.380.850,00	96.93	97,52
	Jumlah Belanja	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	17.256.034.294,00	84.21	80,37

Capaian bagian pendapatan senilai 119.19% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, target anggaran senilai Rp. 276,329,157,274.00 terealisasi senilai Rp. 327,500,641,030.22 atau 118.51%
- b. Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 0,00, terealisasi senilai Rp. 0,00
- c. Lain-lain PAD yang sah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp.0,00 terealisasi senilai Rp. 5,284,027,968.51.

Capaian bagian belanja senilai 84.21% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran senilai Rp. 22,868,025,288.42 terealisasi senilai Rp. 18,833,403,946.00 atau 82.35%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran senilai Rp. 4,887,438,953.00 terealisasi senilai Rp. 4,197,870,296.00 atau 85.89%
- c. Belanja Modal, Target anggaran senilai Rp. 2,703,409,924.00 terealisasi senilai Rp. 2,620,531,768.00 atau 96.93%

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain:
 - Jumlah personal yang ada masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah objek pajak daerah se Kabupaten Lombok Tengah
 - Minimnya jumlah personal membuat banyak objek pajak yang belum di Kelola dengan optimal
 - Dalam pengelolaan PBBP2 oleh para kepala dusun dan kepala lingkungan, belum seluruhnya kepala dusun dan kepala lingkungan menjalankan tugas sebagai pemungut pajak PBBP2 menjalankan tugasnya dengan optimal.
 - Kesadaran objek pajak untuk membayar pajak masih sangat kurang.
 - Banyak usaha yang melakukan pencatatan secara manual sehingga sulit untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
- b. Kendala terkait dengan efisiensi belanja.

Dalam pencapaian efisiensi belanja, relatif tidak ada kendala yang dihadapi.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrua (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrua untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrua untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat

perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara

rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo

kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

1.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan

hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/ternak dan aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
5. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	276,329,157,274.00	327,500,641,030.22	118.51	182.328.157.865,50
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	975.000,00
3	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	5,284,027,968.51	0,00	1.531.604.620,62
TOTAL		276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183.860.737.486,12

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LRA untuk pos pendapatan pajak daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo pendapatan pajak daerah yang dianggarkan dan di serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	261.843.932,00
	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	261.843.932,00
b	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	673.886.229,91
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	673.886.229,91
c	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.806.500,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	3.506.500,00
	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	300.000,00
d	Pajak Reklame	2.200.000.000,00	2.025.321.880,00	92,06	1.947.094.265,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.200.000.000,00	2.025.321.880,00	92,06	1.947.094.265,00
	Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
e	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	176.927.675,00
	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	176.927.675,00
g	Pajak Air Tanah	361.085.293,75	410.255.543,00	113,61	487.944.413,00
	Pajak Air Tanah	361.085.293,75	410.255.543,00	113,61	487.944.413,00
h	Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27	4.350.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet	4.867.500,00	500.000,00	10,27	4.350.000,00
i	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.991.234.820,49	4.770.677.876,75	95,58	3.549.329.804,00
	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO	4.991.234.820,49	4.770.677.876,75	95,58	3.549.329.804,00
j	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40	16.013.894.795,00
	PBBP2	22.082.761.379,00	16.871.275.735,00	76,40	16.013.894.795,00
k	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	41.500.000.000,00	61.896.234.001,00	149,14	35.702.051.083,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	41.500.000.000,00	61.896.234.001,00	149,14	35.702.051.083,00
l	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J),PBJT],	127.183.118.280,76	161.835.166.625,47	127,24	123.507.029.168,59
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	43.267.383.724,53	59.389.757.066,76	137,26	40.558.956.651,69
	PBJT-Tenaga Listrik	31.555.863.711,83	31.951.028.651,00	101,25	31.282.324.551,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	46.336.116.863,77	63.067.293.876,31	136,10	45.255.519.994,40
	PBJT-Jasa Parkir	1.762.629.507,45	1.609.880.939,00	91,33	1.449.087.453,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4.261.124.473,18	5.817.206.092,40	136,51	4.961.140.518,50
m	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	38.333.255.000,00	36.884.496.784,00	96,22	0,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Opsen PKB	38,333,255,000.00	36,884,496,784.00	96.22	0,00
N	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39,672,835,000.00	42,806,712,585.00	107.89	0,00
	Opsen BBNKB	39,672,835,000.00	42,806,712,585.00	107.89	0,00
	TOTAL	276,329,157,274.00	327,500,641,030.22	118.51	182.328.157.865,50

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran anggaran tahun 2025 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- Terdapat 2 jenis pajak baru yang menjadi sumber pendapatan daerah yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
- Pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik
- Insensitas tim bapenda yang lebih banyak turun lapangan ke objek objek pajak daerah

Penjelasan Kenaikan/Penurunan Pajak Daerah sebagai berikut:

- Realisasi Pajak Reklame tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 78,227,615.00 atau 4,02% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah WP Pajak Reklame dan animo pemasangan Reklame pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan 2024
- Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (77,688,870.00) atau (15.92)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh volume penggunaan air tanah pada tahun 2025 menurun dibandingkan pada tahun 2024.
- Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp. (3.850.000,00) atau (88,51)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh:
 - Penurunan realisasi pendapatan disebabkan karena penurunan produksi walet di tahun 2024.
 - Rendahnya kesadaran pengusaha sarang burung wallet untuk membayar pajak. Selain itu juga dari hasil penelusuran ke wajib pajak, para pengusaha sarang burung wallet mengaku tidak ada wallet yang bersarang di Gedung mereka
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.1,221,348,072.75 atau (34.41)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh:
 - Karena ada SKK (Surat Kuasa Khusus) dengan Kejaksanaan Negeri Lombok Tengah sehingga Bapenda dibantu dalam penagihan Pajak MBLB.
 - Penambahan MBLB lebih banyak di tahun 2024 disebabkan Pembangunan fisik baik oleh pemerintah maupun masyarakat lebih banyak dibandingkan tahun 2023.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 857,380,940.00 atau (5.35)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh lebih banyak Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan yang lebih menguasai pola penagihan PBB di wilayah masing masing sehingga perolehan mereka meningkat di tahun 2025.
- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26,194,182,918.00 atau (73.37)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh lebih banyak pergantian hak tanah dan bangunan di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 dan perkembangan ekonomi dan Pembangunan yang pesat di KEK Mandalika menyebabkan harga tanah dan bangunan juga meningkat sehingga nilai Pajak BPHTB juga meningkat.
- Pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 18,830,800,415.07 atau (46.43)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh meningkatkannya jumlah kunjungan wisata ke Lombok Tengah, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata RI, Hingga Desember 2025, kunjungan ke KEK Mandalika diprediksi mencapai 1,4 juta orang. Berdasarkan data per bulan Mei 2025, terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara yang sangat tinggi (peningkatan 89,57%) dibandingkan periode sama di 2024.

- h. Pajak PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 668,704,100.00 atau (2.14)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah pelanggan listrik PLN.
- i. Pajak PBJT-Jasa Perhotelan tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17,811,773,881.91 atau (39.36)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh meningkatkannya jumlah kunjungan wisata ke Lombok Tengah, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata RI, Hingga Desember 2025, kunjungan ke KEK Mandalika diprediksi mencapai 1,4 juta orang. Berdasarkan data per bulan Mei 2025, terjadi lonjakan kunjungan wisatawan Nusantara yang sangat tinggi (peningkatan 89,57%) dibandingkan periode sama di 2024.
- j. Pajak PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 160,793,486.00 atau (11.10)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh meningkatnya aktifitas ekonomi masyarakat. Diantaranya:
- Sepanjang tahun 2025, Bandara Lombok melayani 2.497.163 penumpang, meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 2.377.410 penumpang yang berdampak kepada banyaknya jumlah parkir yang digunakan.
 - Jumlah pengunjung/pasien pada 2025 cenderung lebih tinggi dibandingkan 2024, didorong oleh peningkatan status rumah sakit ke Tipe B dan peningkatan kapasitas layanan yang berdampak pada jumlah pengunjung dan parkir meningkat.
- k. Pajak PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp. 856,065,573.90 atau (17.26)% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang disebabkan oleh bertambahnya penonton MOTO GP 2025 dan bertambahnya jumlah objek pajak PBJT Jasa kesenian dan hiburan.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	975.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	975.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	975.000,00
	a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2024			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	0,00	0,00	975.000,00
	Total	0,00	0,00	0,00	975.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2025 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

- a. Mulai tahun 2024, Bapenda sudah tidak lagi mengelola Retribusi.

5.1.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah					
1	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	4,263,199,106.38	0,00	736.441.127,07
	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	4,263,199,106.38	0,00	736.441.127,07
2	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	982,443,947.13	0,00	795.163.493,55
	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	165,332,747.46	0,00	89.000.741,00
	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	214,721,117.67	0,00	32.164.963,70
	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	503,100.00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Pajak MBLB	0,00	311,552.00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda PBBP2	0,00		0,00	673.997.788,85
	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	19,471,090.00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	581,685,636.00	0,00	0,00
	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	418,704.00	0,00	0,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
3	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	38,384,915.00		0,00
	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	38,384,915.00		0,00
	Total	0,00	5,284,027,968.51	0,00	1.531.604.620,62

Penjelasan:

Sebab-sebab rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2025 dan realisasi tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

a. Terdapat penerimaan pajak daerah yang belum bisa ditelusuri dan diidentifikasi jenis pendapatannya.

b. Karena mulai tahun 2024, Bapenda sudah tidak lagi menjadi pemungut Retribusi daerah

Penjelasan Kenaikan dan Penurunan Pendapatan Lain Lain PAD yang sah

a. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.3,526,757,979.31 atau 478.89% dari tahun 2024 yang disebabkan oleh: pada tahun 2025, jumlah penerimaan yang tidak dapat ditelusuri dan diidentifikasi sumber pendapatannya lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2024.

b. Pendapatan denda pajak hotel tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 76,332,006.46 atau 85.77% yang disebabkan oleh:

- Jumlah objek pajak hotel yang telat melewati jatuh tempo dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya lebih banyak sehingga lebih banyak nilai denda pajak hotel.
- Karena nilai pendapatan objek pajak hotel meningkat (sesuai realisasi pajak daerah 2025), maka ketika terlambat membayar pajak, menyebabkan nilai denda yang perlu dibayar juga lebih banyak.

c. Pendapatan denda pajak restoran tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 182,556,153.97 atau 567.56% yang disebabkan oleh:

- jumlah objek pajak restoran yang telat melewati jatuh tempo dalam melakukan pembayaran kewajiban pajaknya lebih banyak sehingga lebih banyak nilai denda pajak hotel.
- Karena nilai pendapatan objek pajak restoran meningkat (sesuai realisasi pajak daerah 2025), maka ketika terlambat membayar pajak, menyebabkan nilai denda yang perlu dibayar juga lebih banyak.

d. Untuk denda pajak parkir, MBLB, PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB meningkat karena sesuai nilai denda karena pada tahun 2024, pajak pajak tersebut tidak ada nilai denda pajaknya.

e. Pada tahun 2025 PBB-P2, belum dikenakan denda, sehingga nilai denda pada tahun 2025 adalah Rp.0,00.

f. Pendapatan denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2025 lebih banyak daripada tahun 2024 karena di tahun 2024, tidak ada pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam APBD TA 2025 adalah sebesar Rp. 25,651,806,010.00 mencapai 84.21% dari anggaran belanja daerah TA 2025 sebesar Rp. 30,458,874,165.42. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16.561.653.444,00
2.	Belanja Modal	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694.380.850,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Jumlah	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17.256.034.294,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 23,031,274,242.00 atau mencapai 82.97% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp. 27,755,464,241.42. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35	14.447.736.632,00
2	Belanja Barang Jasa	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	85.89	2.113.916.812,00
	J u m l a h	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16.561.653.444,00

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 18,833,403,946.00 atau mencapai 82.35% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp. 22,868,025,288.42. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.8. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35	14.447.736.632,00
	a. Gaji dan Tunjangan	6,572,523,394.00	6,566,747,123.00	99.91	6.441.166.886,00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	5,337,688,934.00	5,336,741,233.00	99.98	5.191.670.668,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	5,248,233,034.00	5,247,625,333.00	99.98	5.191.670.668,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	3,631,500.00	3,465,870.00	95.43	0,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	512,775,750.00	512,337,614.00	99.91	516.363.234,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	509,144,250.00	508,871,744.00	99.94	516.363.234,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3,631,500.00	3,465,870.00	95.43	0,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140,260,000.00	138,810,000.00	98.96	126.030.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140,260,000.00	138,810,000.00	98.96	126.030.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42,590,000.00	41,720,000.00	97.95	79.340.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42,590,000.00	41,720,000.00	97.95	79.340.000,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	223,590,000.00	222,890,000.00	99.68	224.770.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	217,320,000.00	216,920,000.00	99.81	224.770.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6,270,000.00	5,970,000.00	95.21	0,00
	5 Belanja Tunjangan Beras ASN	296,258,440.00	295,618,440.00	99.78	298.949.760,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	291,078,720.00	290,838,720.00	99.91	298.949.760,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,179,720.00	4,779,720.00	92.27	0,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	6 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19,285,620.00	18,558,186.00	96.22	3.971.051,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19,285,620.00	18,558,186.00	96.22	3.971.051,00
	7 Belanja Pembulatan Gaji ASN	74,650.00	71,650.00	95.98	72.173,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,519.00	70,519.00	97.24	72.173,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,131.00	1,131.00	53.07	0,00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16,295,501,894.42	12,266,656,823.00	75.27	2.416.623.721,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,911,434,921.00	1,897,094,386.00	99.24	2.416.623.721,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,911,434,921.00	1,897,094,386.00	99.24	2.416.623.721,00
	2. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14,384,066,973.42	10,369,562,437.00	72.09	5.589.946.025,00
	a Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				5.576.464.025,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel				896.626.075,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran				690.809.962,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	110,000,000.00	75,963,742.00	69.05	59.208.618,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan				917.511.943,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir				15.849.793,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	18,054,264.68	12,467,895.00	69.05	4.130.595,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	243,375.00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	249,561,741.03	198,015,126.00	79.34	80.013.927,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1,194,823,031.26	421,448,290.00	35.27	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2,075,000,000.00	1,857,927,198.00	89.53	1.404.999.998,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]	6,926,765,913.77	6,475,902,331.00	93.49	1.507.313.114,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,825,976,897.68	1,327,837,855.00	72.71	0,00
	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik	1.810.705.420,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)				
2	Belanja Honorarium				13.482.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				13.482.000,00
	Jumlah	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35	14.447.736.632,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2025 dan realisasi Tahun 2024 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Jumlah objek pajak dan target pendapatan bertambah sehingga belanja insentif pegawai menjadi meningkat
2. Jumlah pegawai Bapenda tahun 2025 yang lebih banyak daripada tahun 2024

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 4,197,870,296.00 atau mencapai 85.89% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2025 sebesar Rp. 4,887,438,953.00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Barang Jasa				
1	Belanja Barang	2,055,403,259.00	1,803,382,000.00	87.73	1.360.306.950,00
	a. Belanja Bahan Pakai Habis	2,055,403,259.00	1,803,382,000.00	87.73	1.360.306.950,00
2	Belanja Jasa	2,582,881,694.00	2,211,592,168.00	85.62	390.771.482,00
	a. Belanja Jasa Kantor	2,211,946,430.00	1,992,635,210.00	90.08	384.831.482,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1,604,064.00	420,000.00	26.18	1.440.000,00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	157,950,000.00	16,456,958.00	10.41	0,00
	d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7,081,200.00	0.00	0,00	4.500.000,00
	e. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	199,800,000.00	197,580,000.00	98.88	0.00
	f. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00
3	Belanja Pemeliharaan	113,980,000.00	102,450,000.00	89.88	38.750.000,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113,980,000.00	102,450,000.00	89.88	38.750.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	135,174,000.00	80,446,128.00	59.51	324.088.380,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135,174,000.00	80,446,128.00	59.51	324.088.380,00
	Jumlah	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	85.89	2.113.916.812,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan realisasi Tahun 2024 diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Pada tahun 2025, terdapat kegiatan pemutakhiran data objek PBB-P2 di 8 desa dan kelurahan

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 2,620,531,768.00 atau mencapai 96.93% dari anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 2,703,409,924.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56	694.380.850,00
	Belanja Modal Alat Angkutan	1,126,636,404.00	1,083,600,000.00	96,18	0,00
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	213,995,280.00	200,285,400.00	93.59	0,00
	Belanja Modal Komputer	950,752,920.00	928,746,368.00	97.68	288,349,000.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99	0,00
	Jumlah	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694.380.850,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Pada Tahun 2025 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 di realisasikan sebesar Rp. 2,212,631,768.00 atau mencapai 96.56% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2,291,384,604.00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56	694.380.850,00
1	Belanja Modal Alat Angkutan	1,126,636,404.00	1.083.600.000,00	96,18	0,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.126.636.404,00	1.083.600.000,00	96,18	0,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.126.636.404,00	1.083.600.000,00	96,18	0,00
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	213,995,280.00	200,285,400.00	93.59	406.031.850,00
	Belanja Modal Alat Kantor	95,426,000.00	94,834,400.00	99.38	240.302.850,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95,426,000.00	94,834,400.00	99.38	240.302.850,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	104,577,530.00	91,460,000.00	87.45	165.729.000,00
	Belanja Modal Mebel	104,577,530.00	91,460,000.00	87.45	164.001.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.991.750,00	13.991.000,00	99,99	1.728.000,00
3	Belanja Modal Komputer	950,752,920.00	928,746,368.00	97.68	288.349.000,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Komputer Unit	832,500,000.00	821,464,718.00	98.67	147.270.000,00
	Belanja Modal Personal Computer	130,500,000.00	121,799,998.00	93.33	74.520.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	702,000,000.00	699,664,720.00	99.66	72.750.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	118,252,920.00	107,281,650.00	90.72	141.079.000,00
	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	118,252,920.00	107,281,650.00	90.72	140.829.000,00
	J u m l a h	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56	694.380.850,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terdapat pembelian 4 mobil di dinas pada tahun 2025
2. Pembelian mesin printer printronik dan penambahan pembelian printer dot matrik dan laptop dan PC untuk kebutuhan BKP dan para juru pungut pajak daerah

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp. 332,784,668,998.73 dan Belanja Daerah sebesar Rp. 25,651,806,010.00, sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp. 307,132,862,988.73 atau 124.91% dari anggaran sebesar (Rp. 245,870,283,108.58) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	276,329,157,274.00	329,364,011,068.20	119.19	183.865.987.486,12
2	Belanja	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17.256.034.294,00
	Surplus/ (Defisit)	245,870,283,108.58	307,132,862,988.73	124.91	166.609.953.192,12

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.2.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya. Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.372.839.259.563,82 dan Rp. 371.803.154.702,18 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.13. Rincian Aset

No	Uraian	31 Desember 2025	31-Des-24
		(Rp)	(Rp)
1	Aset Lancar	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35
2	Aset Tetap	5.154.624.050,15	3.500.959.335,11
3	Aset Lainnya	111.382.604,72	111.382.604,72
	Jumlah	372.839.259.563,82	371.803.154.702,18

Berikut rincian per item aset.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.367.573.252.908,95 dan Rp. 368.190.812.762,35. Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.14. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Kas dan setara Kas	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
2	Piutang Pajak Daerah	91.559.127.521,07	86.378.017.612,07
3	Piutang Retribusi Daerah	1.713.434.474,33	1.713.434.474,33
4	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	96.065.539,74	96.065.539,74
5	Penyisihan Piutang	(59.287.152.699,43)	(53.499.211.507,02)
6	Persediaan	274.553.689,00	285.282.259,00
	Jumlah	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35

Berikut ini adalah rincian

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya. Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.,00 dan Rp. 0,00. Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.15. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	31 Desember 2025		31-Des-24
		(Rp)		(Rp)
1	Kas di Kas Daerah	473.741.475.180,85		166.608.612.192,12
	Jumlah	473.741.475.180,85		166.608.612.192,12

5.2.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.93,368,627,535.14 dan Rp. 88,187,517,626.14 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17. Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		(Rp)			(Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Pajak Daerah	91,559,127,521.07	(57,573,718,225.09)	0,00	86.378.017.612,07
2	Piutang Retribusi	1.713.434.474,33	(1.713.434.474,34)	0,00	1.713.434.474,33
4	Piutang Lain-lain PAD yg sah	96,065,539.74	0,00	0,00	96.065.539,74
	Jumlah	93,368,627,535.14	(53.499.211.507,03)	0,00	88.187.517.626,14

Berikut ini adalah rincian Piutang:

5.2.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

Piutang pajak adalah Piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 91,559,127,521.07 dan Rp. 86.378.017.612,07. Berikut rincian Piutang pajak daerah:

Tabel 5.18. Daftar Piutang Pajak Daerah

No	Uraian	31 Desember 2025			31 Desember 2024
		(Rp)			(Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	37,453,750.00	(1,056,518.75)	0,00	33.693.750,00
2	Piutang Pajak Air Tanah	102,000.00	(510.00)	0,00	22.596.200,00

3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	91,521,571,771.07	(57,572,661,196.34)	0,00	86.321.727.662,07
	Jumlah	91,559,127,521.07	(57.573.718.225,09)	0,00	86.378.017.612,07

Daftar Piutang Pajak Daerah dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi adalah Piutang yang timbul akibat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun wajib retribusi belum melunasi sampai dengan akhir periode laporan Keuangan.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.1.713.434.474,33 dan Rp. 1.713.434.474,33 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19. Daftar Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	49.525.000,00	(49.525.000,00)	0,00	49.525.000,00
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	459.415.983,33	(459.415.983,34)	0,00	459.415.983,33
3	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.204.493.491,00	(1.204.493.491,00)	0,00	1.204.493.491,00
	Jumlah	1.713.434.474,33	(1.713.434.474,34)	0,00	1.713.434.474,33

Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang lain-lain PAD yang sah adalah Piutang yang timbul dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang sah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp.96.065.539,74 dan Rp. 96.065.539,74 Berikut Rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5.20. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

NO	Uraian	31-Des-25 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	8,751,826.36	8.751.826,36
2	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.063.713,38	12.063.713,38
3	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75,250,000.00	75.250.000,00
	TOTAL	96,065,539.74	96.065.539,74

Daftar Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.2.1.1.3.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.(59,287,152,699.43) dan Rp. .(53.499.211.507,02). Penyisihan piutang pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak senilai Rp. (57,573,718,225.09) dan Penyisihan Piutang Retribusi senilai Rp. (1.713.434.474,34)

5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 274,553,689.00 dan Rp. 285.282.259,00. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.21 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor (Bahan Cetak)	274,553,689.00	285.282.259,00
	Jumlah	274,553,689.00	285.282.259,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada Lampiran 2

5.2.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 5.154.624.050,15 dan Rp. 3.500.959.335,11 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.22. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8,389,236,930.55	6.283.718.804,23
3	Gedung dan Bangunan	3,428,548,378.00	3.032.648.378,00
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	284.666.000,00	284.666.000,00

	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	12,502,451,308.55	10.001.033.182,33
7	Akumulasi Penyusutan	(7,347,484,586.00)	(6.500.073.847,12)
	Jumlah Bersih	5.154.624.050,15	3.509.663.169,11

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagai berikut;

5.2.1.2.2 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 400.000.000,00 dan Rp. 400.000.000,00. Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2025 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.23. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.1	Tanah		
1.3.1.01	Tanah		
1.3.1.01.01	Tanah Persil	400.000.000	400.000.000
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Kantor	400.000.000	400.000.000

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak berubah karena tidak ada penambahan aset tanah di tahun 2025.

5.2.1.2.3 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 8,389,236,930.55 dan Rp. 6.283.718.804,23. Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.24 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	8.389.236.930,55	6.283.718.804,23
1.3.2.02	Alat Angkutan	3.953.414.339,85	2.988.927.981,53
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	43.650.000,00	43.650.000,00
1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.592.568.022,70	1.380.282.622,70
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	20.538.000,00	20.538.000,00
1.3.2.08	Alat Laboratorium	14.087.000,00	14.087.000,00
1.3.2.09	Alat Persenjataan	2.450.000,00	2.450.000

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.2.10	Komputer	2.762.529.568,00	1.833.783.200,00

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp. 2,105,518,126.32 disajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.25. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	6,283,718,804.23
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	2,212,631,768.00
2	Mutasi antar OPD	-
3	Reklasifikasi Antar KIB	12,000,000.00
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	-
	Jumlah Mutasi Tambah	2,212,631,768.00
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	-
2	Ekracomtabel	-
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	-
4	Reklas ke KIB Lainnya	-
5	Mutasi antar OPD	-
6	akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin-kendaraan bermotor roda 2	119,113,641.68
	Jumlah Mutasi Kurang	131,113,641.68
IV	Saldo Akhir	8,389,236,930.55

5.2.1.2.4 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 3,428,548,378.00 dan Rp. 3.032.648.378,00. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.26. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.3	Gedung Dan Bangunan		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3.400.548.378,00	3.004.648.378,00
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.000.000,00	28.000.000,00

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.27. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	3.032.648.378,00
II	Penambahan	0
1	Belanja Modal TA 2024	407,900,000.00
2	Nilai Taksiran	
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	407,900,000.00
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	12.000.000,00
5	Extracomptable	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	12.000.000,00
IV	Saldo Akhir	3.428.548.378,00

5.2.1.2.5 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 284.666.000,00 dan Rp. 284.666.000,00 dengan Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.28 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	284.666.000,00	284.666.000,00
1.3.4.03	Instalasi	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.4.04	Jaringan	257.066.000,00	257.066.000,00

Pada Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada kenaikan/penurunan nilai. Nilai aset tetap jalan, jalan, jaringan dan irigasi periode Tahun 2024 dan tahun 2025 berjumlah sama.

5.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. (7.347.827.258,40) dan Rp (6.500.073.847,12).

5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.111.382.604,72 dan Rp. 111.382.604,72. Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lain-lain :		
	Aset Rusak Berat/Usang	35.321.429,72	35.321.429,72
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	76.061.175,00	76.061.175,00
	Jumlah	111.382.604,72	111.382.604,72

Pada Aset Lainnya tidak ada kenaikan/penurunan nilai. Nilai aset Lainnya periode Tahun 2024 dan tahun 2025 berjumlah sama.

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 2,408,526.00 dan Rp.597.017.270,00. Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.31. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	2,408,526.00	597.017.270,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	2,408,526.00	597.017.270,00

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 2,408,526.00 dan Rp. 597.017.270,00. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.32. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	425.538.068,00
2	Utang Belanja dan Transfer	2,408,526.00	171.479.202,00
	Jumlah	804.678,00	597.017.270,00

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp. 425.538.068,00.

Daftar rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut.

Tabel 5.33. Pendapatan Diterima Dimuka

NO	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
A	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	425.538.068,00
	Jumlah	0,00	425.538.068,00

5.2.2.1.2 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.2,408,526.00 dan Rp. 171.479.202,00. Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.34. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	0,00	169.507.536,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	2,408,526.00	1.971.666,00
	Total	2,408,526.00	171.479.202,00

5.2.2.1.2.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp.0,00 dan Rp. 169.507.536,00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.35. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	0,00	234.780,00

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	0,00	169.253.974,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	18.782,00
4	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00
	Total	0,00	169.507.536,00

5.2.2.1.2.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 2,408,526.00 dan Rp. 1.971.666,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024(Rp)
1	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	574,246.00	591.304,00
2	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,834,280.00	1.380.362,00
	Total	2,408,526.00	1.971.666,00

5.2.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 39,619,969,325.98 dan Rp. 37.988.913.047,94. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp. 1,631,056,278.04 atau sebesar 4,294% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 37,988,913,047.94.

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Program dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 338,391,316,975.73 dan senilai Rp. 192.214.143.113,37. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.37. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 338,391,316,975.73 dan Rp. 192.214.143.113,37. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.38. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LO	333,107,289,007.22	190.681.563.492,75
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	975.000,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	5,284,027,968.51	1.531.604.620,62
Jumlah	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.39. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Pajak Daerah-LO	333.107.289.007,22	190.681.563.492,75
	a. Pajak Hotel	0,00	261.843.932,00
	b. Pajak Restoran	0,00	673.886.229,91
	c. Pajak Hiburan	0,00	3.806.500,00
	d. Pajak Reklame	2,454,619,948.00	2.215.411.061,25
	e. Pajak Penerangan Jalan	0,00	25.514.569.522,00
	f. Pajak Parkir	0,00	176.927.675,00
	g. Pajak Air Tanah	387,761,343.00	496.125.399,00
	h. Pajak Sarang Burung Walet	500,000.00	4.350.000,00
	i. Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO	4,770,677,876.75	3.549.329.804,00
	j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22,071,119,844.00	24.090.802.640,00
	k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	61,896,234,001.00	35.702.051.083,00
	l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	161,835,166,625.47	123.507.029.168,59
	j. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	36,884,496,784.00	0,00
	k. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	42,806,712,585.00	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	0,00	975.000,00
	a. Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	0,00	975.000,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	5,284,027,968.51	1.531.604.620,62
	a. Jasa Giro	0,00	0,00
	b. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	4,263,199,106.38	736.441.127,07
	c. Pendapatan Denda Pajak Daerah	982,443,947.13	795.163.493,55
	d. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	38,384,915.00	0,00
	Jumlah	338.391.316.975,73	192.214.143.113,37

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah LRA Tahun 2025 senilai Rp. 327,500,641,030.22. Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 333.107.289.007,22 dan Rp. 190.681.563.492,75. Berikut ini merupakan

penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional Tahun 2025.

Tabel 5.40. Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Pajak Hotel	0,00	261.843.932,00
1	Pajak Hotel	0,00	261.843.932,00
B	Pajak Restoran	0,00	673.886.229,91
	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	673.886.229,91
C	Pajak Hiburan-LO	0,00	3.806.500,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	3.506.500,00
	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	300.000,00
D	Pajak Reklame-LO	2.454.619.948,00	2.215.411.061,25
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	2.454.619.948,00	2.215.411.061,25
E	Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	0,00	0,00
F	Pajak Parkir-LO	0,00	176.927.675,00
	Pajak Parkir-LO	0,00	176.927.675,00
G	Pajak Air Tanah-LO	387.761.343,00	496.125.399,00
	Pajak Air Tanah-LO	387.761.343,00	496.125.399,00
H	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	4.350.000,00
	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	4.350.000,00
I	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.770.677.876,75	3.549.329.804,00
	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO	4.770.677.876,75	3.549.329.804,00
J	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	22.071.119.844,00	24.090.802.640,00
	PBBP2-LO	22.071.119.844,00	24.090.802.640,00
K	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00
	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00
K	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	161.835.166.625,47	123.507.029.168,59
	Pajak Barang dan Jasa Tertentu [PBJT]-LO	161.835.166.625,47	123.507.029.168,59
L	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	36.884.496.784,00	0,00
	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	36.884.496.784,00	0,00
M	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	42.806.712.585,00	0,00
	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	42.806.712.585,00	0,00
	TOTAL	333.107.289.007,22	190.681.563.492,75

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Bertambahnya jumlah objek pajak daerah dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang pada tahun 2025 menjadi pajak daerah.

- b. Pengelolaan pemungutan pajak daerah di tahun 2025 lebih efektif dibandingkan dengan tahun 2024

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2025 ini lebih lebih besar dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 5,606,647,977.00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.41. Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	5,606,647,977.00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	pendapatan di terima dimuka pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron th 2024 yg telah di bayarkan pada Tahun 2025	425,538,068.00
A	penambahan piutang pajak reklame Tahun 2025 an. PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA	19,510,000.00
B	penambahan piutang PBBP2 Tahun 2025	8,936,465,635.00
C		
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	pembayaran piutang pajak reklame Tahun 2024 an CV. KUBUS MEDIA ADVERTISAM	15,750,000.00
B	pembayaran piutang pajak PBBP2 Tahun 2012 - 2024	3,736,621,526.00
C	pembayaran piutang Pajak Air Tanah	22,494,200.00
	Jumlah Penjelasan Selisih	5,606,647,977.00

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 975.000,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp 975.000,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp. 0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.42. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	975.000,00
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	975.000,00
	TOTAL	0,00	975.000,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pada Tahun 2025, tidak ada lagi penerimaan retribusi di Bapenda.

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 1.531.604.620,62 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 5,284,027,968.51 dan Rp. 1.531.604.620,62.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.43. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	4,263,199,106.38	736.441.127,07
Pendapatan Denda Pajak Daerah	982,443,947.13	795.163.493,55
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	38,384,915.00	0,00
Jumlah	5,284,027,968.51	1.531.604.620,62

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Di tahun 2025, jumlah Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dan Pendapatan Denda Pajak Daerah lebih banyak daripada tahun 2024 karena terdapat pendapatan yang belum bisa diidentifikasi ditelusuri jenis pendapatannya.
 - b. Di tahun 2025, terdapat Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah senilai Rp.38,384,915.00

5.3.1.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 29,627,167,507.56 dan Rp. 28.228.430.525,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44. Rincian Beban

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Operasional	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	966.181.708,16	342.691.687,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	29,627,167,507.56	28.228.430.525,00

5.3.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 28.660.985.799,40 dan Rp. 27.885.738.838,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.45. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	18,663,896,410.00	12.916.639.005,00
2	Beban Barang dan Jasa	4,209,035,726.00	2.120.269.897,00
3	Beban Penyisihan Piutang	5,788,053,663.40	12.848.829.936,00
	Jumlah	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00

5.3.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 18.663.896.410,00 dan Rp.12.916.639.005,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.46. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.566.493.561,00	6.439.845.946,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	5,336,517,633.00	5.190.513.188,00
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	512,326,434.00	516.181.064,00
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	138,810,000.00	126.030.000,00
d.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	41,720,000.00	79.340.000,00
e.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	222,890,000.00	224.770.000,00
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	295,618,440.00	298.949.760,00
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18,558,186.00	3.971.051,00
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	71,650.00	72.101,00
i.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	(18,782.00)	18.782,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12,097,402,849.00	2.407.755.297,00
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,727,840,412.00	2.407.755.297,00
b.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10,369,562,437.00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	4.069.037.762,00
a.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	4.055.555.762,00
b.	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	

No.	Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
	c.	Beban Honorarium	0,00	13.482.000,00
Jumlah			18,663,896,410.00	12.916.639.005,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah target pendapatan dengan realisasi tinggi sehingga otomatis menyebabkan beban tambahan penghasilan PNS juga menjadi bertambah banyak.
 - b. Terdapat pengeluaran insentif penerimaan pajak daerah di tahun 2024 yang dibayarkan dengan anggaran tahun 2025 seperti insentif PBB-P2 realisasi 35% dan insentif PPJ senilai 70%
 - c. Jumlah pegawai tahun 2025 lebih banyak daripada tahun 2024

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 169,507,536.00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.47. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	169,507,536.00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	0,00
Pengurangan Beban LO:	169,507,536.00
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Belanja Gaji Pokok PNS	223.600,00
Utang Tunjangan Keluarga PNS	11.180,00
Beban iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.782,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169.253.974,00
Jumlah Penjelasan Selisih	169,507,536.00

5.3.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp. 4,209,035,726.00 dan Rp. 2.120.269.897,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Beban Barang	1,814,110,570.00	1.365.339.374,00
1	Beban Barang Pakai Habis	1,814,110,570.00	1.365.339.374,00
B	Beban Jasa	2,212,029,028.00	392.092.143,00
1	Beban Jasa Kantor	1,993,072,070.00	386.152.143,00
2	Beban iuran Jaminan/Asuransi	420,000.00	1,440,000.00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16,456,958.00	4.500.000,00
4	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	197,580,000.00	

5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,500,000.00	4,500,000.00
C	Beban Pemeliharaan	102,450,000.00	38.750.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,450,000.00	38.750.000,00
D	Belana Perjalanan Dinas	80,446,128.00	324.088.380,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80,446,128.00	324.088.380,00
	Jumlah	4,209,035,726.00	2.120.269.897,00

Belanja Barang dan Jasa – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp. 4.209.035.726,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa - LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 2.120.269.897,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Pada Tahun 2025, terdapat pengeluaran untuk beban Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum dalam rangka pemutakhiran data PBB P2 di 8 Desa dan kelurahan senilai Rp. 1,609,770,975.00.
 - b. Tahun 2025, terdapat pembelian 4 unit kendaraan dinas roda 4.

5.3.1.2 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 senilai Rp. 5,788,053,663.40 dan Rp. 12.848.829.936,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.50 Rincian Beban Penyisihan

Uraian	31 Desember Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5,788,053,663.40	12.848.829.936,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	395.118.076,67
Jumlah	5,788,053,663.40	12.848.829.936,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut: Terjadi penyisihan piutang PBBP2 senilai Rp. 5,788,034,863.40.
2. Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2025 ini lebih sedikit daripada selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7,060,776,272.60.

5.3.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 dan 2024 senilai masing-masing Rp. 966,181,708.16 dan Rp. 342.691.687,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan

dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	896,830,596.39	283.909.894,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62,004,461.77	51.410.550,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	7,346,650.00	7.371.243,00
Jumlah	966,181,708.16	342.691.687,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Lebih banyak mesin yang mengalami penyusutan dan amortisasi pada tahun 2025
2. Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2024 diungkapkan dalam CaLK.

5.3.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai masing-masing Rp. 308,764,149,468.17 dan Rp. 163.985.712.588,37 terdiri dari:

Tabel 5.52 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan-LO	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37
2	Beban-LO	29,627,167,507.56	28.228.430.525,00
	Surplus/(Defisit) Operasional	308,764,149,468.17	163.985.712.588,37

5.3.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.3.3.1 Surplus Non Operasional Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.53 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	112,471.00	576.677.888,48

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Piutang Terbayar)	112,471.00	576.677.888,48
Jumlah	112,471.00	576.677.888,48

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Surplus Non-Operasional Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya pembayaran atas Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah senilai Rp. 112,471.00

5.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Badan Pendapatan Daerah di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.55 Rincian Beban Luar Biasa

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.3.5 SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.56 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	338,391,316,975.73	192.214.143.113,37
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➤ Beban Operasional	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00
✓ Beban Operasional	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00
➤ Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.885.738.838,00	342.691.687,00

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
✓ Beban penyusutan dan amortisasi	27.885.738.838,00	342.691.687,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	308.764.149.468,17	163.985.712.588,37
Kegiatan Non-Operasional	0,00	0,00
➤ Surplus Non-Operasional	112.471,00	576.677.888,48
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	112.471,00	576.677.888,48
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	112,471,00	576.677.888,48
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85

5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.57 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	37,988,913,047.94	40.035.134.763,21

5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.58 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	308.764.149.468,17	163.985.712.588,37
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional	112,471.00	576.677.888,48
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) – LO	308,764,261,939.17	164.562.390.476,85

Pada Tahun 2025 dan 2024 Badan Penadapatan Daerah memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*

5.4.3 R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. (307.132.862.988,73) dan Rp.(166.608.612.192,12).

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.59 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(342.672,40)	0,00
Total	(342.672,40)	0,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.4.5.1 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. (342.672,40) sebagai kurang saji dan senilai Rp. 0,00 sebagai kurang saji. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 5.60 Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
A	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		
1	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(342.672,40)	0,00
	Total	(342.672,40)	0,00

5.4.5 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.61 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	39,619,969,325.98	37.988.913.047,94

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Badan Pendapatan Daerah berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi: penunjang keuangan lingkup pengelolaan pajak

6.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

6.2.1. Kantor

Badan Pendapatan Daerah memiliki kantor di Pusat Kantor Bupati Lombok Tengah Gedung A Lantai 1. Selain itu, terdapat kantor BKP (Bendahara Khusus Penerimaan) di setiap Kecamatan.

Bapenda juga memberikan pelayanan di MPP (Mall Pelayanan Publik) Kabupaten Lombok Tengah.

6.2.2. Pegawai

Berikut daftar pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah:

No	Nama	NIP	Golongan Pangka	Nama Jabatan
1	Hj. BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., M.M.	197307291997032008	IV/c	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2	FITRI ANDRIYANI, S.Sos.	196912211989032005	IV/b	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3	ZAFRULLAH HARIADI, S.P.	198306142006041010	III/c	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan (BAPENDA)
4	L JAYAPRANA, S.Sos.	196810281991031010	IV/a	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
5	LALE FUJILARASHATI, S.E.	196903131995032002	III/d	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Kebijakan
6	MUSA SALEHUDIN, S.E.	197006051990031016	III/d	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Potensi
7	LALU NURHIDAYAT SUHARTA, S.H., M.Si.	197412312003121026	III/d	Kepala Bidang Pendapatan Daerah
8	LALU HARIS FAHMI HR, S.E.	197606262009011003	III/d	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan
9	RAHADIAN SUKMAJAYA, S.STP., M.M.	198206222000121001	IV/a	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
10	LALU NANDHA SEPTIAN ABDURRAHMAN, S.STP.	199509222017081001	III/c	Kepala Sub Bidang Evaluasi, Pemeriksaan dan Pembinaan
11	FANDY PERDANA HERIYATNA, S.STP.	199505012017081002	III/c	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Penegakan Sanksi
12	LALU SATRIA WANGSA, S.Sos.	197412302003121001	III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda
13	LALU IIP SATRYA WIJAYA, S.STP.	199409042016091003	III/c	Perencana Ahli Muda
14	I DEWA KETUT DWIJA, S.E.	197101251998031005	III/d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
15	BAIQ ENDANG KURNIATI	198410312025212007	V	Pengadministrasi Perkantoran
16	NURWIDIAWATI	198101042025212027	V	Pengadministrasi Perkantoran
17	SUMARNI	197712312008012047	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
18	B. FARIDA HAIRANI	198410192012122005	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
19	BAIQ MELIA HARPENI	198305042010012006	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
20	LILIS INDRAYANI	198508232012122001	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
21	M. MASKUR ISWANDY	198504012010011005	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
22	SAPRI	197312312014071022	II/c	Pengadministrasi Perkantoran
23	IBRAHIM	197001152012121001	I/d	Pengadministrasi Perkantoran

24	LALU ABDUL WASIT, S.IP.	197603292001121005	III/d	Penelaah Teknis Kebijakan
25	LALU RUSTANDI, S.Kom.	197612312007011063	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
26	KURRATA AINI, S.E.	198012312006042018	III/c	Penelaah Teknis Kebijakan
27	BAIQ NURBAITI, S.E.	198012312009012006	III/c	Pengolah Data dan Informasi
28	MARIANI, S.Adm.	198405202009012004	III/b	Pengolah Data dan Informasi
29	KOMANG ARI WIDYASTINI, A.Md.Ak.	199912152020122001	II/d	Pengolah Data dan Informasi
30	AHMAD SYARIF, S.Adm.	197805302001121004	III/d	Pengolah Data dan Informasi
31	AHMAD AULIA, S.Kom.	198301012010011027	III/d	Pengolah Data dan Informasi
32	LALU ROSYUHAN SUPYAN HAFIFI, S.E.	197904112010011008	III/d	Pengolah Data dan Informasi
33	MARIATI, S.IP.	196812311994022010	III/d	Pengolah Data dan Informasi
34	BAHARUDIN, S.Adm.	196712312007011308	III/c	Pengolah Data dan Informasi
35	EDDY ERMAN HARIRUSTAMAN, S.E.	198009062009011006	III/c	Pengolah Data dan Informasi
36	BAIQ JAHROYANI, A.Md.	197512092009012002	III/c	Pengolah Data dan Informasi
37	HENY LUKMIATI, S.Sos.	198304142001122006	III/c	Pengolah Data dan Informasi
38	LALU SUHADI, A.Md.	196812312009011031	III/c	Pengolah Data dan Informasi
39	SAMANHUDI, S.Adm.	196812312007011309	III/c	Pengolah Data dan Informasi
40	DARMAWATI, S.Adm.	197412312007011111	III/b	Pengolah Data dan Informasi
41	NURPAI, S.Pd.	196812312010011008	III/b	Pengolah Data dan Informasi
42	LALU NURSAIP SALIM	197702241996031002	III/b	Pengolah Data dan Informasi
43	NURSAN, S.P.	197212312008011105	III/b	Pengolah Data dan Informasi
44	NASRI	196812311998031069	III/b	Pengolah Data dan Informasi
45	LALU SOPYAN HADI	196912101992031011	III/b	Pengolah Data dan Informasi
46	LALU SYARIPUDIN	197312312001121019	III/b	Pengolah Data dan Informasi
47	JANUM, S.Adm.	196712312008011096	III/b	Pengolah Data dan Informasi
48	BAIQ FITRIAH	197310011995032002	III/b	Pengolah Data dan Informasi
49	SWARNA, S.H.	197412312008011063	III/b	Pengolah Data dan Informasi
50	BURHANUDDIN, S.T.	197612312008011048	III/b	Pengolah Data dan Informasi
51	MAWARDI, S.H.	197504042012121003	III/a	Pengolah Data dan Informasi
52	LALU JAYADI	196812312007011297	III/a	Pengolah Data dan Informasi
53	LALU AHMAD RIFAI	196712312007011416	III/a	Pengolah Data dan Informasi
54	MUHAMMAD TAOFAN ANGGER ARDANA, S.Tr.IP.	200011042023081002	III/a	Pengolah Data dan Informasi
55	ROHMINI	198302212009012001	III/a	Pengolah Data dan Informasi
56	WIRATNI	198305032009012004	III/a	Pengolah Data dan Informasi
57	HERU ADIGUNA, S.E.	197912222010011006	III/a	Pengolah Data dan Informasi
58	MAULUT RASIDI	197005202008011023	III/a	Pengolah Data dan Informasi
59	LALU KASTAMAN HADI	197707232007011015	III/a	Pengolah Data dan Informasi
60	DENI ERLAN	198505142009011003	III/a	Pengolah Data dan Informasi
61	SAIFAN ALI	198010102009011014	III/a	Pengolah Data dan Informasi
62	MUSLIHAN	198112312009012011	III/a	Pengolah Data dan Informasi
63	EKHSAN	197512312007011115	III/a	Pengolah Data dan Informasi
64	MAHYUDIN	196812312007011428	III/a	Pengolah Data dan Informasi
65	BAIQ EVA SUSANTI DEWI	197807222009012005	III/a	Pengolah Data dan Informasi
66	YUSUP	196912312010011010	II/d	Pengolah Data dan Informasi
67	MUSLIMUN	196912312010011012	II/d	Pengolah Data dan Informasi
68	RASIDI	196712312006041036	II/d	Pengolah Data dan Informasi
69	SUARMAN	197310292010011004	II/d	Pengolah Data dan Informasi
70	LALU AHMAD MUYASSIR, A.Md.	198802072022031001	II/c	Pengolah Data dan Informasi
71	DAWAE	196712312007011277	II/a	Pengolah Data dan Informasi
72	SANI WAHYUNINGSIH, S.H.	198305232010012003	III/a	Pengolah Data dan Informasi
73	LALU MUHAMMAD ASLAM, S.Adm.	196712312003121040	III/d	Pengolah Data dan Informasi
74	RAUHUN HOTIMAH, S.E.	198412312012122003	III/b	Pengolah Data dan Informasi
75	MINASE	198212312009012009	III/a	Pengolah Data dan Informasi
76	DEDY PURWANTO	197507032008011012	III/a	Pengolah Data dan Informasi
77	NANA HERLIANA, A.Md.	199412232020122015	II/d	Pengolah Data dan Informasi
78	BAIQ MARNIWISAH, A. Md	198303042025212019	VII	Pengelola Layanan Operasional
79	DEWI SARTIKA	197812312009012006	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
80	LALU AMANAH	197112312007011156	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
81	BUSAIRI	197503272001121004	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
82	ISWAHYUDI, S.Pd.	197403152014071004	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
83	IKA SRIKOMALASARI, S.E.	198206032012122001	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
84	LALU YAHYA	197412312007011164	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
85	BAIQ NURMASANTI	198403142012122001	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
86	ARY ANDRIYANTO	197511302012121001	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
87	LALU HERI WAHYUDI	198512312010011009	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
88	BAIQ RATNA	197112312012122007	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
89	MUDRI KAHUDDIN	198105102012121003	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
90	BAIQ AGUSTINA MERDEKA WATY	198508222012122004	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
91	SUDARMONO	197012312014071016	II/c	Pengadministrasi Perkantoran
92	WIRA TWO SURYAWIJAYA, S.H.	198012032014071003	II/c	Pengadministrasi Perkantoran
93	LALU Satria HADIWIJAYA	197212152007011015	II/b	Pengadministrasi Perkantoran
94	BAIQ LILY ASMAWATI	197210271992032006	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
95	SUPARMAN	197406032009011002	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
96	LALU ROSY HARIADI	197505062009011003	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
97	SAPARUDIN	197112312012121015	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
98	BAMBANG HARYANTO	197401162001121003	III/b	Pengadministrasi Perkantoran
99	BAIQ NURHIDAYATI	197411162012122001	II/d	Pengadministrasi Perkantoran
100	MALA ROHENDY	197411112006041009	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
101	MARIA YUHANA	198003232009012007	II/d	Operator Layanan Operasional (Kelas 5)
102	NURHIDAYATI	198306242025212009	V	Operator Layanan Operasional (Kelas 5)
103	LALU PURWANTO PRANOTO	197308122025211016	V	Operator Layanan Operasional (Kelas 5)
104	SUAN RAHADI	198004231999021001	III/b	Operator Layanan Operasional (Kelas 5)
105	LUKMAN	197012312012121014	I/d	Operator Layanan Operasional (Kelas 1)
106	ILMAN MASHURI AJI, SP.	198001032025211019	IX	Penata Layanan Operasional

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Kab. Lombok Tengah, 24 Februari 2026

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

**Badan Pendapatan Daerah
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JURNAL PENYESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025



No	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	591,304.00	
	2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,380,362.00	
	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		591,304.00
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1,380,362.00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang Barang dan Jasa Th 2024 di Tahun 2025		
2	8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	574,246.00	
	8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,834,280.00	
		Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		574,246.00
		Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		1,834,280.00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan adanya utang Barang dan Jasa Th 2025 dan Belum di Bayar sd Desember 2025 yang akan di bayarkan di tahun 2026		
2	2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	169,253,974.00	
	8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		169,253,974.00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang TPP Th 2024 yang dibayarkan Tahun 2025		
3	2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	223,600.00	
	2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	11,180.00	
	2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	18,782.00	
	8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS		223,600.00
	8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS		11,180.00
	8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		18,782.00
		Jurnal Penyesuaian atas pembayaran utang gaji dan tunjangan pegawai Th 2024 yang dibayarkan Tahun 2025		
4	1.1.12.01.03.0003	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	274,553,689.00	
	8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		274,553,689.00
		Jurnal Penyesuaian atas pengakuan sisa persediaan barang habis pada periode tahun berkenaan berdasarkan berita acara hasil opname persediaan (Contoh sisa Persediaan Per 31 Desember 2025)		

5	8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	285,282,259.00	
	1.1.12.01.03.0003	Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak		285,282,259.00
		<i>Jurnal Penyesuaian sisa persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak (Kuasi) Tahun 2024</i>		
4	2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	425,538,068.00	
	8.1.02.02.01.0055	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO		425,538,068.00
		<i>Jurnal Penyesuaian atas pendapatan di terima dimuka pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron th 2024 yg telah di bayarkan pada Tahun 2025</i>		
5	8.1.08.01.02.0002	<i>beban Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	205,328,571.43	
	1.3.07.01.02.01.002	<i>Akumulasi Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang</i>		205,328,571.43
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-kendaraan bermotor penumpang)</i>		
6	8.1.08.01.03.0002	<i>Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)</i>	75,000.00	
	1.3.07.01.03.01.002	<i>Akumulasi Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)</i>		75,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah))</i>		
7	8.1.08.01.05.0004	<i>Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</i>	28,834,997.94	
	1.3.07.01.05.01.004	<i>Akumulasi Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor</i>		28,834,997.94
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor)</i>		
8	8.1.08.01.05.0005	<i>Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya</i>	2,727,146.34	
	1.3.07.01.05.01.005	<i>Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Lainnya</i>		2,727,146.34
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Alat Kantor Lainnya)</i>		
9	8.1.08.01.05.0006	<i>Beban Penyusutan Meubelair</i>	205,487,660.47	
	1.3.07.01.05.02.001	<i>Akumulasi Penyusutan Meubelair</i>		205,487,660.47
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Meubelair)</i>		
10	8.1.08.01.05.0011	<i>Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>	35,727,367.18	
	1.3.07.01.05.02.006	<i>Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>		35,727,367.18

		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))</i>		
11	8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	1,833,333.37	
	1.3.07.01.05.03.001	Akumulasi Penyusutan Meja Kerja Pejabat		1,833,333.37
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin-Meja Kerja Pejabat)</i>		
12	8.1.08.01.05.0015	Beban penyusutan Kursi Kerja Pejabat	1,971,683.37	
	1.3.07.01.05.03.003	Akumulasi penyusutan Kursi Kerja Pejabat		1,971,683.37
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Kursi Kerja Pejabat)</i>		
13	8.1.08.01.05.0019	Beban penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	3,477,600.00	
	1.3.07.01.05.03.007	Akumulasi penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat		3,477,600.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Lemari dan Arsip Pejabat)</i>		
14	8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	948,375.00	
	1.3.07.01.08.01.017	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Film		948,375.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Alat Laboratorium Film)</i>		
15	8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Personal Komputer	148,893,912.69	
	1.3.07.01.10.01.002	Akumulasi Penyusutan Personal Komputer		148,893,912.69
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Personal Komputer]</i>		
16	8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan komputer Unit Lainnya	2,530,245.34	
	1.3.07.01.10.01.003	Akumulasi Penyusutan komputer Unit Lainnya		2,530,245.34
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- komputer Unit Lainnya]</i>		
17	8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan komputer Peralatan Mainframe	2,500,000.00	
	1.3.07.01.10.02.001	Akumulasi Penyusutan komputer Peralatan Mainframe		2,500,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- komputer Peralatan Mainframe]</i>		
18	8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer	201,253,036.25	
	1.3.07.01.10.02.003	Akumulasi Penyusutan Peralatan Personal Komputer		201,253,036.25
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Peralatan Personal Komputer]</i>		

19	8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	54,666,667.00	
	1.3.07.01.10.02.004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Jaringan		54,666,667.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Peralatan Peralatan Jaringan]</i>		
20	8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	575,000.01	
	1.3.07.01.10.02.005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya		575,000.01
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset peralatan dan mesin- Peralatan Komputer Lainnya]</i>		
21	8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	45,309,632.21	
	1.3.07.02.01.01.001	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Kantor		45,309,632.21
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Bangunan Gedung Kantor]</i>		
22	8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	932,000.00	
	1.3.07.02.01.01.002	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gudang		932,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Bangunan Gudang]</i>		
23	8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	225,380.00	
	1.3.07.02.01.01.008	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah		225,380.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Bangunan Gedung Tempat Ibadah]</i>		
24	8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	2,104,200.00	
	1.3.07.02.01.01.014	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool		2,104,200.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Bangunan Garasi/Pool]</i>		
25	8.1.08.02.01.0028	Beban Penyusutan Bangunan Industri	12,873,249.56	
	1.3.07.02.01.01.028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Industri		12,873,249.56
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Bangunan Industri]</i>		
26	8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Pagar	560,000.00	
	1.3.07.02.04.01.004	Akumulasi Penyusutan Pagar		560,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset Gedung dan bangunan - Pagar]</i>		

27	8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	920,000.00	
	1.3.07.03.03.01.005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya		920,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset jalan jembatan dan Irigasi - Instalasi air bersih/air baku lainnya)</i>		
28	8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Distribusi	6,426,650.00	
	1.3.07.03.04.02.002	Akumulasi Penyusutan Jaringan Distribusi		6,426,650.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset jalan jembatan dan Irigasi - Jaringan Distribusi)</i>		
29	1.3.02.05.02.0006	Aset Peralatan dan Mesin	12,000,000.00	
	1.3.03.01.01.0001	Aset Gedung dan Bangunan		12,000,000.00
		<i>(reklas aset Gedung dan bangunan berupa tenda...ke kib B)</i>		
30	3.1.01.01.01.0001	Koreksi ekuitas	342,672.40	
	1.3.07.02.01.0001	Akumulasi penyusutan aset gedung bangunan		342,672.40
		<i>(jurnal penyesuaian kurang saji akumulasi penyusutan karena perpindahan aplikasi)</i>		
31	1.3.07.01.02.0004	akumulasi penyusutan aset peralatan dan mesin-kendaraan bermotor roda 2	119,113,641.68	
	1.3.02.02.01.0004	Aset Tetap peralatan dan mesin - aset kendaraan roda 2		119,113,641.68
		<i>(jurnal reklas ke bkad)</i>		
32	1.1.03.09.01.0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	19,510,000.00	
	7.1.01.09.01.0001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron-LO		19,510,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian penambahan piutang pajak reklame Tahun 2025 an. PT. MUHAMMAD SYAHRI PURNAMA)</i>		
33	7.1.01.09.01.0001	Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron-LO	15,750,000.00	
	1.1.03.09.01.0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron		15,750,000.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas pembayaran piutang pajak reklame Tahun 2024 an CV. KUBUS MEDIA ADVERTISAMA)</i>		
34	8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	18,800.00	
	1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron		18,800.00
		<i>(Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron)</i>		
35	1.1.03.15.01.0001	Piutang PBBP2	8,936,465,635.00	

	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO		8,936,465,635.00
		<i>(jurnal penyesuaian penambahan piutang PBBP2 Tahun 2025)</i>		
36	7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	3,736,621,526.00	
	1.1.03.15.01.0001	Piutang PBBP2		3,736,621,526.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas pembayaran piutang pajak PBBP2 Tahun 2024)</i>		
37	8.1.07.01.15.0001	Beban penyisihan Piutang Pajak PBBP2	5,788,034,863.40	
	1.1.10.01.01.0154	Penyisihan piutang pajak PBBP2		5,788,034,863.40
		<i>(Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang Pajak PBBP2)</i>		
38	7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	22,494,200.00	
	1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah		22,494,200.00
		<i>(jurnal penyesuaian atas pembayaran piutang Pajak Air Tanah)</i>		
39	1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	112,471.00	
	7.4.03.01.01.0001	surplus dari kegiatan operasional lainnya		112,471.00
		<i>(Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang Pajak Air Tanah)</i>		
		JUMLAH	733,723,676.00	733,723,676.00

Kab. Lombok Tengah, 31 Desember 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah



Baiq Aluh Wjndayu Wiranorn, S.E.,M.M.
NIP. 197307291997032008

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh empat** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh enam** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2025
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2025
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.


Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP. 19750302 200003 2 006


Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,

BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	PENDAPATAN DAERAH	332,784,668,998.73	332,784,668,998.73	0			332,784,668,998.73
a.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	332,784,668,998.73	332,784,668,998.73	0			332,784,668,998.73
	Pajak Daerah	327,500,641,030.22	327,500,641,030.22	0			327,500,641,030.22
	Lain-lain PAD yang Sah	5,284,027,968.51	5,284,027,968.51				5,284,027,968.51
2	BELANJA DAERAH	25,651,806,010.00	25,651,806,010.00				25,651,806,010.00
a.	BELANJA OPERASI	23,031,274,242.00	23,031,274,242.00				23,031,274,242.00
	Belanja Pegawai	18,833,403,946.00	18,833,403,946.00				18,833,403,946.00
	Belanja Barang dan Jasa	4,197,870,296.00	4,197,870,296.00				4,197,870,296.00
b.	BELANJA MODAL	2,620,531,768.00	2,620,531,768.00				2,620,531,768.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,212,631,768.00	2,212,631,768.00				2,212,631,768.00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407,900,000.00	407,900,000.00				407,900,000.00

Praya, 24 Februari 2026

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP. 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	ASET	372.839.259.563,82	372.839.259.563,82				372.839.259.563,82
1	ASET LANCAR	367.573.252.908,95	367.573.252.908,95				367.573.252.908,95
	Kas dan Setara Kas	473.741.475.180,85	473.741.475.180,85				473.741.475.180,85
	Piutang Pajak Daerah	91.559.127.521,07	91.559.127.521,07				91.559.127.521,07
	Piutang Retribusi Daerah	1.713.434.474,33	1.713.434.474,33				1.713.434.474,33
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96.065.539,74	96.065.539,74				96.065.539,74
	Penyisihan Piutang	(59.287.152.699,43)	(59.287.152.699,43)				(59.287.152.699,43)
	Persediaan	274.553.689,00	274.553.689,00				274.553.689,00
2	ASET TETAP	5.154.624.050,15	5.154.624.050,15				5.154.624.050,15
	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00				400.000.000,00
	Peralatan dan Mesin	8.389.236.930,55	8.389.236.930,55				8.389.236.930,55
	Gedung dan Bangunan	3.428.548.378,00	3.428.548.378,00				3.428.548.378,00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	284.666.000,00	284.666.000,00				284.666.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(7.347.827.258,40)	(7.347.484.586,00)				(7.347.484.586,00)
3	ASET LAINNYA	111.382.604,72	111.382.604,72				111.382.604,72
B	KEWAJIBAN	2.408.526,00	2.408.526,00				2.408.526,00
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.408.526,00	2.408.526,00				2.408.526,00
C	EKUITAS	39.619.969.325,98	39.619.969.325,98				39.619.969.325,98
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	39.622.377.851,98	39.622.377.851,98				39.622.377.851,98

Praya, 24 Februari 2026

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP. 19750302 200003 2 006



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	PENDAPATAN DAERAH – LO	338.391.316.975,73	338,391,316,975.73				338,391,316,975.73
	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	338,391,316,975.73	338,391,316,975.73				338,391,316,975.73
	Pajak Daerah - LO	333.107.289.007,22	333,107,289,007.22				333,107,289,007.22
	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5,284,027,968.51	5,284,027,968.51				5,284,027,968.51
B	BEBAN DAERAH	29,627,167,507.56	29,627,167,507.56				29,627,167,507.56
	BEBAN OPERASI	28.660.985.799,40	28.660.985.799,40				28.660.985.799,40
	Beban Pegawai	18,663,896,410.00	18,663,896,410.00				18,663,896,410.00
	Beban Barang dan Jasa	4,209,035,726.00	4,209,035,726.00				4,209,035,726.00
	Beban Penyisihan Piutang	5,788,053,663.40	5,788,053,663.40				5,788,053,663.40
C	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	308,764,149,468.17	308,764,149,468.17				308,764,149,468.17
D	KEGIATAN NON OPEASIONAL	112,471.00	112,471.00				112,471.00
	SURPLUS NON OPERASIONAL	112,471.00	112,471.00				112,471.00
	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00				0,00
E	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON - OPERASIONAL	112,471.00	112,471.00				112,471.00
F	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00				0,00
G	SURPLUS/DEFISIT LO	308,764,261,939.17	308,764,261,939.17				308,764,261,939.17

Praya, 24 Februari 2026

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP. 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
A	EKUITAS AWAL	37,988,913,047.94	37,988,913,047.94				37,988,913,047.94
	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	308,764,261,939.17	308,764,261,939.17				308,764,261,939.17
	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	(342,672.40)	(342,672.40)				(342,672.40)
	RK PPKD	(307,132,862,988.73)	(307,132,862,988.73)				(307,132,862,988.73)
	EKUITAS AKHIR	39,619,969,325.98	39,619,969,325.98				39,619,969,325.98

Praya, 24 Februari 2026

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan



WIDYA ASTUTI, S.E., M.Si.
NIP. 19750302 200003 2 006

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,



BAIQ ALUH WINDAYU W., S.E., MM.
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat: JL. Raden Puguh, Gedung Sholah Lantai 1 Kode Pos
Website: <https://Bapendalomboktengahkab.go.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Desember** tahun 2025, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Badan Pendapatan Daerah, dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2025	Rp. 25.652.658.019,00	
Pengeluaran periode sama	Rp. 25.652.658.019,00	
Saldo buku		Rp. 0

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, Rp. 0

terdiri dari:

Uang tunai di brankas

Uang kertas (*Jika ada, harus dirincikan*)

Rp. 0,00 Rp. 0

Uang logam (*Jika ada, harus dirincikan*) Rp. 0,00 Rp. 0

Uang di Rekening

Jumlah Kas

Selisih Kas Rp. 0

Penjelasan atas selisih kas: -

Catatan:

1. Sisa TU tanggal 21 Mei 2025 sebesar Rp. 230.000,00 dan Sisa UP tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 414.309,00 (bukti setor terlampir)
2. Kelebihan bayar gaji PNSD a.n. Baharuddin bulan Desember TA. 2025 sebesar Rp. 207.700,00 yang akan dicatat pada laporan keuangan sebagai pengembalian di Tahun Anggaran 2025 (bukti setor terlampir)

Bendahara Pengeluaran
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(NANA HERLIANA, A.Md.)
NIP. 199412232020122015

Mengetahui,
Kepala Badan pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah

(BAIQ ALUH WINDAYU W, S.E., M.M.)
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
4.1.01	Pajak Daerah	276,329,157,274.00	327,500,641,030.22	118.51	182,328,157,865.50
4.1.01.06	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	261,843,932.00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	261,843,932.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	261,843,932.00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	673,886,229.91
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	673,886,229.91
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0.00	0.00	0.00	673,886,229.91
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	3,806,500.00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0.00	0.00	0.00	3,506,500.00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0.00	0.00	0.00	3,506,500.00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2,200,000,000.00	2,025,321,880.00	92.06	1,947,094,265.00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2,200,000,000.00	2,025,321,880.00	92.06	1,947,094,265.00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2,200,000,000.00	2,025,321,880.00	92.06	1,947,094,265.00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	176,927,675.00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	176,927,675.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	176,927,675.00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	361,085,293.75	410,255,543.00	113.61	487,944,413.00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	361,085,293.75	410,255,543.00	113.61	487,944,413.00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	361,085,293.75	410,255,543.00	113.61	487,944,413.00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	4,867,500.00	500,000.00	10.27	4,350,000.00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	4,867,500.00	500,000.00	10.27	4,350,000.00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	4,867,500.00	500,000.00	10.27	4,350,000.00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4,991,234,820.49	4,770,677,876.75	95.58	3,549,329,804.00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0.00	0.00	0.00	3,549,329,804.00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0.00	0.00	0.00	3,549,329,804.00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	4,991,234,820.49	4,770,677,876.75	95.58	0.00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	4,991,234,820.49	4,770,677,876.75	95.58	0.00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	22,082,761,379.00	16,871,275,735.00	76.40	16,013,894,795.00
4.1.01.15.01	PBBP2	22,082,761,379.00	16,871,275,735.00	76.40	16,013,894,795.00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	22,082,761,379.00	16,871,275,735.00	76.40	16,013,894,795.00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	41,500,000,000.00	61,896,234,001.00	149.14	35,702,051,083.00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	41,500,000,000.00	61,896,234,001.00	149.14	35,702,051,083.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	41,500,000,000.00	61,896,234,001.00	149.14	35,702,051,083.00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	127,183,118,280.76	161,835,166,625.47	127.24	123,507,029,168.59
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	43,267,383,724.53	59,389,757,066.76	137.26	40,558,956,651.69
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	39,107,857,745.00	53,470,373,245.76	136.72	38,134,627,832.69
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4,159,525,979.53	5,919,383,821.00	142.30	2,424,328,819.00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	31,555,863,711.83	31,951,028,651.00	101.25	31,282,324,551.00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	31,555,863,711.83	31,951,028,651.00	101.25	31,282,324,551.00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	46,336,116,863.77	63,067,293,876.31	136.10	45,255,519,994.40
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	34,766,639,569.14	44,112,263,272.63	126.88	41,795,804,107.23
4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel	275,671,875.52	1,174,748,012.00	426.13	280,158,591.00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	9,776,391,224.41	16,381,376,436.59	167.56	2,964,977,501.97
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	1,203,079,915.40	1,044,176,994.00	86.79	214,479,794.20
4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	314,334,279.30	354,729,161.09	112.85	0.00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	1,762,629,507.45	1,609,880,939.00	91.33	1,449,087,453.00

4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1,762,629,507.45	1,609,880,939.00	91.33	1,449,087,453.00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	4,261,124,473.18	5,817,206,092.40	136.51	4,961,140,518.50
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0.00	0.00	0.00	37,020.00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	3,642,079,900.99	3,893,782,794.40	106.91	3,943,451,856.00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	251,898,052.43	1,125,409,073.00	446.77	479,054,738.50
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	39,953,452.17	11,298,903.00	28.28	287,755,419.00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	327,193,067.59	786,715,322.00	240.44	250,841,485.00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	38,333,255,000.00	36,884,496,784.00	96.22	0.00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	38,333,255,000.00	36,884,496,784.00	96.22	0.00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	38,333,255,000.00	36,884,496,784.00	96.22	0.00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	39,672,835,000.00	42,806,712,585.00	107.89	0.00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	39,672,835,000.00	42,806,712,585.00	107.89	0.00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	39,672,835,000.00	42,806,712,585.00	107.89	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	975,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	975,000.00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0.00	0.00	0.00	975,000.00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0.00	0.00	0.00	975,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	5,284,027,968.51	0.00	1,531,604,620.62
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	4,263,199,106.38	0.00	736,441,127.07
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	4,263,199,106.38	0.00	736,441,127.07
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0.00	4,263,199,106.38	0.00	736,441,127.07
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0.00	982,443,947.13	0.00	795,163,493.55
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	165,332,747.46	0.00	89,000,741.00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0.00	165,332,747.46	0.00	89,000,741.00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0.00	214,721,117.67	0.00	32,164,963.70
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0.00	214,721,117.67	0.00	32,164,963.70
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00	503,100.00	0.00	0.00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0.00	503,100.00	0.00	0.00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	311,552.00	0.00	0.00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0.00	311,552.00	0.00	0.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0.00	0.00	0.00	673,997,788.85
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0.00	0.00	0.00	673,997,788.85
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0.00	19,471,090.00	0.00	0.00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0.00	975,000.00	0.00	0.00
4.1.04.12.19.0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0.00	18,496,090.00	0.00	0.00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0.00	581,685,636.00	0.00	0.00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0.00	581,685,636.00	0.00	0.00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0.00	418,704.00	0.00	0.00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0.00	418,704.00	0.00	0.00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0.00	38,384,915.00	0.00	0.00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0.00	38,384,915.00	0.00	0.00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0.00	38,384,915.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
	JUMLAH PENDAPATAN	276,329,157,274.00	332,784,668,998.73	120.43	183,860,737,486.12
5	BELANJA DAERAH	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17,256,034,294.00
5.1	BELANJA OPERASI	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16,561,653,444.00
5.1.01	Belanja Pegawai	22,868,025,288.42	18,833,403,946.00	82.35	14,447,736,632.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6,572,523,394.00	6,566,747,123.00	99.91	6,441,166,886.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5,337,688,934.00	5,336,741,233.00	99.98	5,191,670,668.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,248,233,034.00	5,247,625,333.00	99.98	5,191,670,668.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89,455,900.00	89,115,900.00	99.61	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	512,775,750.00	512,337,614.00	99.91	516,363,234.00

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	509,144,250.00	508,871,744.00	99.94	516,363,234.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3,631,500.00	3,465,870.00	95.43	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	140,260,000.00	138,810,000.00	98.96	126,030,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	140,260,000.00	138,810,000.00	98.96	126,030,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42,590,000.00	41,720,000.00	97.95	79,340,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42,590,000.00	41,720,000.00	97.95	79,340,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	223,590,000.00	222,890,000.00	99.68	224,770,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	217,320,000.00	216,920,000.00	99.81	224,770,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6,270,000.00	5,970,000.00	95.21	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	296,258,440.00	295,618,440.00	99.78	298,949,760.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	291,078,720.00	290,838,720.00	99.91	298,949,760.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,179,720.00	4,779,720.00	92.27	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19,285,620.00	18,558,186.00	96.22	3,971,051.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19,285,620.00	18,558,186.00	96.22	3,971,051.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74,650.00	71,650.00	95.98	72,173.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72,519.00	70,519.00	97.24	72,173.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,131.00	1,131.00	53.07	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16,295,501,894.42	12,266,656,823.00	75.27	2,416,623,721.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,911,434,921.00	1,897,094,386.00	99.24	2,416,623,721.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,911,434,921.00	1,897,094,386.00	99.24	2,416,623,721.00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14,384,066,973.42	10,369,562,437.00	72.09	0.00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	110,000,000.00	75,963,742.00	69.05	0.00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	18,054,264.68	12,467,895.00	69.05	0.00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	243,375.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	249,561,741.03	198,015,126.00	79.34	0.00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1,194,823,031.26	421,448,290.00	35.27	0.00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2,075,000,000.00	1,857,927,198.00	89.53	0.00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6,926,765,913.77	6,475,902,331.00	93.49	0.00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1,825,976,897.68	1,327,837,855.00	72.71	0.00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1,983,641,750.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00	5,589,946,025.00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	5,576,464,025.00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	896,626,075.00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	690,809,962.00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0.00	0.00	0.00	59,208,618.00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0.00	0.00	0.00	917,511,943.00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	15,849,793.00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0.00	0.00	0.00	4,130,595.00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	0.00	80,013,927.00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	1,404,999,998.00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([,PBJT].	0.00	0.00	0.00	1,507,313,114.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0.00	0.00	0.00	13,482,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00	13,482,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4,887,438,953.00	4,197,870,296.00	85.89	2,113,916,812.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,055,403,259.00	1,803,382,000.00	87.73	1,360,306,950.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,055,403,259.00	1,803,382,000.00	87.73	1,360,306,950.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26,100,000.00	26,100,000.00	100.00	21,259,400.00

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	579,678,300.00	495,877,900.00	85.54	275,741,050.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	98,862,237.00	87,511,500.00	88.51	66,639,000.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0.00	0.00	0.00	90,768,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600,892,258.00	563,772,600.00	93.82	525,481,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,100,000.00	750,000.00	68.18	990,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	79,545,032.00	75,973,000.00	95.50	36,926,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,023,918.00	2,972,000.00	98.28	3,192,000.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19,640,560.00	19,630,000.00	99.94	10,000,000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15,174,000.00	15,000,000.00	98.85	0.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2,691,954.00	1,915,000.00	71.13	0.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	13,080,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528,695,000.00	413,880,000.00	78.28	316,230,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,582,881,694.00	2,211,592,168.00	85.62	390,771,482.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,211,946,430.00	1,992,635,210.00	90.08	384,831,482.00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	68,180,000.00	27,230,000.00	39.93	5,110,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	99,000,000.00	25,500,000.00	25.75	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,659,420,000.00	1,609,770,975.00	97.00	287,450,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,800,000.00	4,160,000.00	53.33	0.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10,116,000.00	9,900,000.00	97.86	0.00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	180,000,000.00	179,871,060.00	99.92	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	65,300,000.00	60,100,000.00	92.03	37,200,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9,828,000.00	6,919,382.00	70.40	7,308,871.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8,280,000.00	0.00	0.00	512,500.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	53,298,000.00	30,463,042.00	57.15	18,061,506.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	32,042,430.00	20,038,751.00	62.53	20,988,605.00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13,482,000.00	13,482,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1,604,064.00	420,000.00	26.18	1,440,000.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	719,400.00	186,665.00	25.94	635,760.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	884,664.00	233,335.00	26.37	804,240.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	157,950,000.00	16,456,958.00	10.41	0.00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	55,950,000.00	9,696,960.00	17.33	0.00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	102,000,000.00	6,759,998.00	6.62	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7,081,200.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	7,081,200.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	199,800,000.00	197,580,000.00	98.88	0.00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	199,800,000.00	197,580,000.00	98.88	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	113,980,000.00	102,450,000.00	89.88	38,750,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113,980,000.00	102,450,000.00	89.88	38,750,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	78,500,000.00	75,000,000.00	95.54	28,000,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	0.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,250,000.00	13,250,000.00	100.00	10,750,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15,330,000.00	7,300,000.00	47.61	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	135,174,000.00	80,446,128.00	59.51	324,088,380.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135,174,000.00	80,446,128.00	59.51	324,088,380.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,504,000.00	14,676,128.00	83.84	91,608,380.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	117,670,000.00	65,770,000.00	55.89	232,480,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27,755,464,241.42	23,031,274,242.00	82.97	16,561,653,444.00

5.2	BELANJA MODAL	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694,380,850.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,291,384,604.00	2,212,631,768.00	96.56	694,380,850.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,126,636,404.00	1,083,600,000.00	96.18	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,126,636,404.00	1,083,600,000.00	96.18	0.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1,126,636,404.00	1,083,600,000.00	96.18	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	213,995,280.00	200,285,400.00	93.59	406,031,850.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	95,426,000.00	94,834,400.00	99.38	240,302,850.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95,426,000.00	94,834,400.00	99.38	240,302,850.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	104,577,530.00	91,460,000.00	87.45	165,729,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	104,577,530.00	91,460,000.00	87.45	164,001,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13,991,750.00	13,991,000.00	99.99	0.00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	3,991,750.00	3,991,000.00	99.98	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	950,752,920.00	928,746,368.00	97.68	288,349,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	832,500,000.00	821,464,718.00	98.67	147,270,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	130,500,000.00	121,799,998.00	93.33	74,520,000.00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	702,000,000.00	699,664,720.00	99.66	72,750,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	118,252,920.00	107,281,650.00	90.72	141,079,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	118,252,920.00	107,281,650.00	90.72	140,829,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	412,025,320.00	407,900,000.00	98.99	0.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	399,886,120.00	395,900,000.00	99.00	0.00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	12,139,200.00	12,000,000.00	98.85	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,703,409,924.00	2,620,531,768.00	96.93	694,380,850.00
	JUMLAH BELANJA	30,458,874,165.42	25,651,806,010.00	84.21	17,256,034,294.00
	SURPLUS/DEFISIT	245,870,283,108.58	307,132,862,988.73	124.91	166,604,703,192.12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	245,870,283,108.58	307,132,862,988.73	124.91	166,604,703,192.12

Kab. Lombok Tengah, 19 Februari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, SE., MM
NIP. 197307291097032008



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
Badan Pendapatan Daerah
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	372.839.259.563,82	371.803.154.702,18
1.1	ASET LANCAR	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35
1.1.01	Kas dan Setara Kas	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	473.741.475.180,85	166.608.612.192,12
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	91.559.127.521,07	86.378.017.612,07
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	37.453.750,00	33.693.750,00
1.1.03.09.01	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	37.453.750,00	33.693.750,00
1.1.03.09.01.0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	37.453.750,00	33.693.750,00
1.1.03.12	Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	22.596.200,00
1.1.03.12.01	Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	22.596.200,00
1.1.03.12.01.0001	Piutang Pajak Air Tanah	102.000,00	22.596.200,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	91.521.571.771,07	86.321.727.662,07
1.1.03.15.01	Piutang PBBP2	91.521.571.771,07	86.321.727.662,07
1.1.03.15.01.0001	Piutang PBBP2	91.521.571.771,07	86.321.727.662,07
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	1.713.434.474,33	1.713.434.474,33
1.1.04.02	Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.713.434.474,33	1.713.434.474,33
1.1.04.02.01	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	508.940.983,33	508.940.983,33
1.1.04.02.01.0001	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	49.525.000,00	49.525.000,00
1.1.04.02.01.0002	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	459.415.983,33	459.415.983,33
1.1.04.02.02	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00
1.1.04.02.02.0002	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.204.493.491,00	1.204.493.491,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	96.065.539,74	96.065.539,74
1.1.06.12	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	96.065.539,74	96.065.539,74
1.1.06.12.06	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.751.826,36	8.751.826,36
1.1.06.12.06.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	8.751.826,36	8.751.826,36
1.1.06.12.07	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	12.063.713,38	12.063.713,38
1.1.06.12.07.0001	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.063.713,38	12.063.713,38
1.1.06.12.16	Piutang Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.250.000,00	75.250.000,00
1.1.06.12.16.0001	Piutang Pendapatan Denda (BPHTB)-Pemindahan Hak	75.250.000,00	75.250.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(59.287.152.699,43)	(53.499.211.507,03)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(59.287.152.699,43)	(53.499.211.507,03)
1.1.10.01.01	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(57.573.718.225,09)	(51.785.777.032,69)
1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(1.056.518,75)	(1.037.718,75)
1.1.10.01.01.0115	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(510,00)	(112.981,00)
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2	(57.572.661.196,34)	(51.784.626.332,94)
1.1.10.01.02	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.713.434.474,34)	(1.713.434.474,34)
1.1.10.01.02.0033	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	(49.525.000,00)	(49.525.000,00)

1.1.10.01.02.0034	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	(459.415.983,34)	(459.415.983,34)
1.1.10.01.02.0041	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	(1.204.493.491,00)	(1.204.493.491,00)
1.1.12	Persediaan	274.553.689,00	285.282.259,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	274.553.689,00	285.282.259,00
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	274.553.689,00	285.282.259,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	274.553.689,00	285.282.259,00
1.1.13	Aset Untuk Dikonsolidasikan	(140.524.250.796,61)	166.608.612.192,12
1.1.13.01	RK SKPD	(140.524.250.796,61)	166.608.612.192,12
1.1.13.01.01	RK SKPD	(140.524.250.796,61)	166.608.612.192,12
1.1.13.01.01.0001	RK SKPD	(140.524.250.796,61)	166.608.612.192,12
	JUMLAH ASET LANCAR	367.573.252.908,95	368.190.812.762,35
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	5.154.624.050,15	3.500.959.335,11
1.3.01	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00
1.3.01.01	Tanah	400.000.000,00	400.000.000,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	400.000.000,00	400.000.000,00
1.3.01.01.01.0007	Tanah Persil Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	8,389,236,930,55	6,283,718,804,23
1.3.02.02	Alat Angkutan	3.953.414.339,85	2.988.927.981,53
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	3.953.414.339,85	2.988.927.981,53
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	2.325.150.000,00	1.241.550.000,00
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	99.250.000,00	99.250.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.222.259.339,85	1.341.372.981,53
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	306.755.000,00	306.755.000,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	43.650.000,00	43.650.000,00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	4.750.000,00	4.750.000,00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	2.500.000,00	2.500.000,00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	2.250.000,00	2.250.000,00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	38.900.000,00	38.900.000,00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	38.900.000,00	38.900.000,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.592.568.022,70	1.380.282.622,70
1.3.02.05.01	Alat Kantor	731.745.350,00	636.910.950,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	33.500.000,00	33.500.000,00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	8.500.000,00	8.500.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	184.842.000,00	184.842.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	504.903.350,00	410.068.950,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	800.013.888,08	696.553.888,08
1.3.02.05.02.0001	Mebel	501.597.488,08	410.137.488,08
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4.600.000,00	4.600.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	118.534.000,00	118.534.000,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	175.282.400,00	163.282.400,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	60.808.784,62	46.817.784,62
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	12.796.421,00	2.796.421,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	25.832.363,62	21.841.363,62
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	7.690.000,00	7.690.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	14.490.000,00	14.490.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.538.000,00	20.538.000,00

1.3.02.06.01	Alat Studio	17.838.000,00	17.838.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	17.838.000,00	17.838.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	2.700.000,00	2.700.000,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	14.087.000,00	14.087.000,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	7.587.000,00	7.587.000,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	7.587.000,00	7.587.000,00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.02.08.02.0005	Laboratory Safety Equipment	6.500.000,00	6.500.000,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	2.450.000,00	2.450.000,00
1.3.02.10	Komputer	2.762.529.568,00	1.833.783.200,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	1.797.098.968,00	975.634.250,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	112.584.000,00	112.584.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	912.100.248,00	790.300.250,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	772.414.720,00	72.750.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	965.430.600,00	858.148.950,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	10.000.000,00	10.000.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	467.284.950,00	467.284.950,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	246.750.000,00	246.750.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	241.395.650,00	134.114.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	3,428,548,378,00	3,032,648,378,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	3.400.548.378,00	3.004.648.378,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.400.548.378,00	3.004.648.378,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	2.581.806.900,00	2.197.906.900,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	46.600.000,00	46.600.000,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	11.269.000,00	11.269.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	105.210.000,00	105.210.000,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	12.000.000,00	0,00
1.3.03.01.01.0028	Bangunan Industri	643.662.478,00	643.662.478,00
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	28.000.000,00	28.000.000,00
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	28.000.000,00	28.000.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	28.000.000,00	28.000.000,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	284.666.000,00	284.666.000,00
1.3.04.03	Instalasi	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.04.04	Jaringan	257.066.000,00	257.066.000,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	257.066.000,00	257.066.000,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	257.066.000,00	257.066.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(7.347.827.258,40)	(6.500.073.847,12)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.849.571.960,94)	(5.071.855.006,23)
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.726.285.769,28)	(2.640.070.839,53)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(1.098.021.429,43)	(892.692.858,00)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(99.250.000,00)	(99.250.000,00)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(1.222.259.339,85)	(1.341.372.981,53)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(306.755.000,00)	(306.755.000,00)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(43.643.750,00)	(43.568.750,00)
1.3.07.01.03.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)

1.3.07.01.03.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	(2.243.750,00)	(2.168.750,00)
1.3.07.01.03.0032	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	(38.900.000,00)	(38.900.000,00)
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.262.196.137,37)	(982.136.348,70)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(33.500.000,00)	(33.500.000,00)
1.3.07.01.05.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(208.383.665,94)	(179.548.668,00)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(172.514.913,34)	(169.787.767,00)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(473.048.222,55)	(267.560.562,08)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(4.600.000,00)	(4.600.000,00)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(118.534.000,00)	(118.534.000,00)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(203.983.267,18)	(168.255.900,00)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(4.629.754,37)	(2.796.421,00)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(20.919.713,99)	(18.948.030,62)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(7.690.000,00)	(7.690.000,00)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(5.892.600,00)	(2.415.000,00)
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(20.538.000,00)	(20.538.000,00)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(17.838.000,00)	(17.838.000,00)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(2.700.000,00)	(2.700.000,00)
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(9.187.063,00)	(8.238.688,00)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(2.687.063,00)	(1.738.688,00)
1.3.07.01.08.0069	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	(6.500.000,00)	(6.500.000,00)
1.3.07.01.09	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(2.450.000,00)	(2.450.000,00)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(2.450.000,00)	(2.450.000,00)
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.785.271.241,29)	(1.374.852.380,00)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(112.584.000,00)	(112.584.000,00)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(779.679.785,69)	(630.785.873,00)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(2.530.245,34)	0,00
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(7.916.667,00)	(5.416.667,00)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(662.798.043,25)	(461.545.007,00)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(219.187.500,00)	(164.520.833,00)

1.3.07.01.10.0008	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(575.000,01)	0,00
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.386.544.360,46)	(1.323.854.553,89)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.379.544.360,46)	(1.317.414.553,89)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.226.705.884,90)	(1.180.710.907,89)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(10.096.667,00)	(9.164.667,00)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(4.301.002,00)	(4.075.622,00)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(20.505.757,00)	(18.401.557,00)
1.3.07.02.01.0028	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	(117.935.049,56)	(105.061.800,00)
1.3.07.02.04	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(7.000.000,00)	(6.440.000,00)
1.3.07.02.04.0004	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	(7.000.000,00)	(6.440.000,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(111.710.937,00)	(104.364.287,00)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	(10.503.284,00)	(9.583.284,00)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(10.503.284,00)	(9.583.284,00)
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(101.207.653,00)	(94.781.003,00)
1.3.07.03.04.0007	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(101.207.653,00)	(94.781.003,00)
	JUMLAH ASET TETAP	5.154.624.050,15	3.500.959.335,11
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	111.382.604,72	111.382.604,72
1.5.04	Aset Lain-lain	111.382.604,72	111.382.604,72
1.5.04.01	Aset Lain-lain	111.382.604,72	111.382.604,72
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	111.382.604,72	111.382.604,72
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	35.321.429,72	35.321.429,72
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	76.061.175,00	76.061.175,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	111.382.604,72	111.382.604,72
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	372.839.259.563,82	371.803.154.702,18
2	KEWAJIBAN	2.408.526,00	597.017.270,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.408.526,00	597.017.270,00
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	425.538.068,00
2.1.05.05	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	0,00	425.538.068,00
2.1.05.05.01	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	0,00	425.538.068,00
2.1.05.05.01.0001	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	425.538.068,00
2.1.06	Utang Belanja	2.408.526,00	171.479.202,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	0,00	169.507.536,00
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	234.780,00
2.1.06.01.01.0001	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	223.600,00
2.1.06.01.01.0003	Utang Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	11.180,00
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	169.253.974,00

2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	169.253.974,00
2.1.06.01.03	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	18.782,00
2.1.06.01.03.0050	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	0,00	18.782,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	2.408.526,00	1.971.666,00
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	2.408.526,00	1.971.666,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	574.246,00	591.304,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.834.280,00	1.380.362,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.408.526,00	597.017.270,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	2.408.526,00	597.017.270,00
3	EKUITAS	39.619.969.325,98	37.988.913.047,94
3.1	EKUITAS	39.619.969.325,98	37.988.913.047,94
3.1.01	Ekuitas	346.752.832.314,71	204.597.525.240,06
3.1.01.01	Ekuitas	37.988.570.375,54	40.035.134.763,21
3.1.01.01.01	Ekuitas	37.988.570.375,54	40.035.134.763,21
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	37.988.570.375,54	40.035.134.763,21
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
3.1.03.01	RK PPKD	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
3.1.03.01.01	RK PPKD	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
	JUMLAH EKUITAS	39.619.969.325,98	37.988.913.047,94
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	39.622.377.851,98	38.585.930.317,94

Kab. Lombok Tengah, 19 Februari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, SE., MM
NIP. 197307291997032008



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
Badan Pendapatan Daerah
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	338.391.316.975,73	192.214.143.113,37	146.177.173.862,36	76,05
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	338.391.316.975,73	192.214.143.113,37	146.177.173.862,36	76,05
7.1.01	Pajak Daerah-LO	333.107.289.007,22	190.681.563.492,75	142.425.725.514,47	74,69
7.1.01.06	Pajak Hotel-LO	0,00	261.843.932,00	(261.843.932,00)	(100,00)
7.1.01.06.01	Pajak Hotel-LO	0,00	261.843.932,00	(261.843.932,00)	(100,00)
7.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel-LO	0,00	261.843.932,00	(261.843.932,00)	(100,00)
7.1.01.07	Pajak Restoran-LO	0,00	673.886.229,91	(673.886.229,91)	(100,00)
7.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	673.886.229,91	(673.886.229,91)	(100,00)
7.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	0,00	673.886.229,91	(673.886.229,91)	(100,00)
7.1.01.08	Pajak Hiburan-LO	0,00	3.806.500,00	(3.806.500,00)	(100,00)
7.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	3.506.500,00	(3.506.500,00)	(100,00)
7.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	0,00	3.506.500,00	(3.506.500,00)	(100,00)
7.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	0,00	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
7.1.01.09	Pajak Reklame-LO	2.454.619.948,00	2.215.411.061,25	239.208.886,75	10,80
7.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	2.454.619.948,00	2.215.411.061,25	239.208.886,75	10,80
7.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	2.454.619.948,00	2.215.411.061,25	239.208.886,75	10,80
7.1.01.11	Pajak Parkir-LO	0,00	176.927.675,00	(176.927.675,00)	(100,00)
7.1.01.11.01	Pajak Parkir-LO	0,00	176.927.675,00	(176.927.675,00)	(100,00)
7.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir-LO	0,00	176.927.675,00	(176.927.675,00)	(100,00)
7.1.01.12	Pajak Air Tanah-LO	387.761.343,00	496.125.399,00	(108.364.056,00)	(21,84)
7.1.01.12.01	Pajak Air Tanah-LO	387.761.343,00	496.125.399,00	(108.364.056,00)	(21,84)
7.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah-LO	387.761.343,00	496.125.399,00	(108.364.056,00)	(21,84)
7.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	4.350.000,00	(3.850.000,00)	(88,51)
7.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	4.350.000,00	(3.850.000,00)	(88,51)
7.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet-LO	500.000,00	4.350.000,00	(3.850.000,00)	(88,51)
7.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	4.770.677.876,75	3.549.329.804,00	1.221.348.072,75	34,41
7.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	0,00	3.549.329.804,00	(3.549.329.804,00)	(100,00)
7.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	0,00	3.549.329.804,00	(3.549.329.804,00)	(100,00)
7.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO	4.770.677.876,75	0,00	4.770.677.876,75	100,00
7.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO	4.770.677.876,75	0,00	4.770.677.876,75	100,00
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	22.071.119.844,00	24.090.802.640,00	(2.019.682.796,00)	(8,38)
7.1.01.15.01	PBBP2-LO	22.071.119.844,00	24.090.802.640,00	(2.019.682.796,00)	(8,38)
7.1.01.15.01.0001	PBBP2-LO	22.071.119.844,00	24.090.802.640,00	(2.019.682.796,00)	(8,38)
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00	26.194.182.918,00	73,37

7.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00	26.194.182.918,00	73,37
7.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	61.896.234.001,00	35.702.051.083,00	26.194.182.918,00	73,37
7.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	161.835.166.625,47	123.507.029.168,59	38.328.137.456,88	31,03
7.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman-LO	59.389.757.066,76	40.558.956.651,69	18.830.800.415,07	46,43
7.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran-LO	53.470.373.245,76	38.134.627.832,69	15.335.745.413,07	40,21
7.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	5.919.383.821,00	2.424.328.819,00	3.495.055.002,00	144,17
7.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik-LO	31.951.028.651,00	31.282.324.551,00	668.704.100,00	2,14
7.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO	31.951.028.651,00	31.282.324.551,00	668.704.100,00	2,14
7.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan-LO	63.067.293.876,31	45.255.519.994,40	17.811.773.881,91	39,36
7.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel-LO	44.112.263.272,63	41.795.804.107,23	2.316.459.165,40	5,54
7.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel-LO	1.174.748.012,00	280.158.591,00	894.589.421,00	319,32
7.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila-LO	16.381.376.436,59	2.964.977.501,97	13.416.398.934,62	452,50
7.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen-LO	1.044.176.994,00	214.479.794,20	829.697.199,80	386,84
7.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan-LO	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
7.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage-LO	354.729.161,09	0,00	354.729.161,09	100,00
7.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir-LO	1.609.880.939,00	1.449.087.453,00	160.793.486,00	11,10
7.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO	1.609.880.939,00	1.449.087.453,00	160.793.486,00	11,10
7.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-LO	5.817.206.092,40	4.961.140.518,50	856.065.573,90	17,26
7.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO	0,00	37.020,00	(37.020,00)	(100,00)
7.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO	3.893.782.794,40	3.943.451.856,00	(49.669.061,60)	(1,26)
7.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO	1.125.409.073,00	479.054.738,50	646.354.334,50	134,92
7.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO	11.298.903,00	287.755.419,00	(276.456.516,00)	(96,07)
7.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO	786.715.322,00	250.841.485,00	535.873.837,00	213,63
7.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	36.884.496.784,00	0,00	36.884.496.784,00	100,00
7.1.01.20.01	Opsen PKB-LO	36.884.496.784,00	0,00	36.884.496.784,00	100,00
7.1.01.20.01.0001	Opsen PKB-LO	36.884.496.784,00	0,00	36.884.496.784,00	100,00
7.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	42.806.712.585,00	0,00	42.806.712.585,00	100,00
7.1.01.21.01	Opsen BBNKB-LO	42.806.712.585,00	0,00	42.806.712.585,00	100,00
7.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB-LO	42.806.712.585,00	0,00	42.806.712.585,00	100,00
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	975.000,00	(975.000,00)	(100,00)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	975.000,00	(975.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	975.000,00	(975.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	0,00	975.000,00	(975.000,00)	(100,00)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.284.027.968,51	1.531.604.620,62	3.752.423.347,89	245,00
7.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.263.199.106,38	736.441.127,07	3.526.757.979,31	478,89
7.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.263.199.106,38	736.441.127,07	3.526.757.979,31	478,89
7.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	4.263.199.106,38	736.441.127,07	3.526.757.979,31	478,89
7.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	982.443.947,13	795.163.493,55	187.280.453,58	23,55
7.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	165.332.747,46	89.000.741,00	76.332.006,46	85,77

7.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	165.332.747,46	89.000.741,00	76.332.006,46	85,77
7.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran-LO	214.721.117,67	32.164.963,70	182.556.153,97	567,56
7.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	214.721.117,67	32.164.963,70	182.556.153,97	567,56
7.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	503.100,00	0,00	503.100,00	100,00
7.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	503.100,00	0,00	503.100,00	100,00
7.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	311.552,00	0,00	311.552,00	100,00
7.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	311.552,00	0,00	311.552,00	100,00
7.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	0,00	673.997.788,85	(673.997.788,85)	(100,00)
7.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2-LO	0,00	673.997.788,85	(673.997.788,85)	(100,00)
7.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	19.471.090,00	0,00	19.471.090,00	100,00
7.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
7.1.04.12.19.0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO	18.496.090,00	0,00	18.496.090,00	100,00
7.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	581.685.636,00	0,00	581.685.636,00	100,00
7.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO	581.685.636,00	0,00	581.685.636,00	100,00
7.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	418.704,00	0,00	418.704,00	100,00
7.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO	418.704,00	0,00	418.704,00	100,00
7.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	38.384.915,00	0,00	38.384.915,00	100,00
7.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	38.384.915,00	0,00	38.384.915,00	100,00
7.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	38.384.915,00	0,00	38.384.915,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	338.391.316.975,73	192.214.143.113,37	146.177.173.862,36	76,05
	JUMLAH PENDAPATAN	338.391.316.975,73	192.214.143.113,37	146.177.173.862,36	76,05
8	BEBAN	29.627.167.507,56	28.228.430.525,00	1.398.736.982,56	4,96
8.1	BEBAN OPERASI	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00	775.246.961,40	2,78
8.1.01	Beban Pegawai	18.663.896.410,00	12.916.639.005,00	5.747.257.405,00	44,49
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	6.566.493.561,00	6.439.845.946,00	126.647.615,00	1,97
8.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	5.336.517.633,00	5.190.513.188,00	146.004.445,00	2,81
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	5.247.401.733,00	5.190.513.188,00	56.888.545,00	1,10
8.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	89.115.900,00	0,00	89.115.900,00	100,00
8.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	512.326.434,00	516.181.064,00	(3.854.630,00)	(0,75)
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	508.860.564,00	516.181.064,00	(7.320.500,00)	(1,42)
8.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	3.465.870,00	0,00	3.465.870,00	100,00
8.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	138.810.000,00	126.030.000,00	12.780.000,00	10,14
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	138.810.000,00	126.030.000,00	12.780.000,00	10,14
8.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	41.720.000,00	79.340.000,00	(37.620.000,00)	(47,42)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	41.720.000,00	79.340.000,00	(37.620.000,00)	(47,42)
8.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	222.890.000,00	224.770.000,00	(1.880.000,00)	(0,84)
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	216.920.000,00	224.770.000,00	(7.850.000,00)	(3,49)
8.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	100,00
8.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	295.618.440,00	298.949.760,00	(3.331.320,00)	(1,11)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	290.838.720,00	298.949.760,00	(8.111.040,00)	(2,71)
8.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	4.779.720,00	0,00	4.779.720,00	100,00

8.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.558.186,00	3.971.051,00	14.587.135,00	367,34
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.558.186,00	3.971.051,00	14.587.135,00	367,34
8.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	71.650,00	72.101,00	(451,00)	(0,63)
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	70.519,00	72.101,00	(1.582,00)	(2,19)
8.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.131,00	0,00	1.131,00	100,00
8.1.01.01.09	Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	(18.782,00)	18.782,00	(37.564,00)	(200,00)
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	(18.782,00)	18.782,00	(37.564,00)	(200,00)
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	12.097.402.849,00	2.407.755.297,00	9.689.647.552,00	402,43
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.727.840.412,00	2.407.755.297,00	(679.914.885,00)	(28,24)
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.727.840.412,00	2.407.755.297,00	(679.914.885,00)	(28,24)
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.369.562.437,00	0,00	10.369.562.437,00	100,00
8.1.01.02.06.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	75.963.742,00	0,00	75.963.742,00	100,00
8.1.01.02.06.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	12.467.895,00	0,00	12.467.895,00	100,00
8.1.01.02.06.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	198.015.126,00	0,00	198.015.126,00	100,00
8.1.01.02.06.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	421.448.290,00	0,00	421.448.290,00	100,00
8.1.01.02.06.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.857.927.198,00	0,00	1.857.927.198,00	100,00
8.1.01.02.06.0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.475.902.331,00	0,00	6.475.902.331,00	100,00
8.1.01.02.06.0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.327.837.855,00	0,00	1.327.837.855,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	4.069.037.762,00	(4.069.037.762,00)	(100,00)
8.1.01.03.01	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	4.055.555.762,00	(4.055.555.762,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	508.895.192,00	(508.895.192,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	420.623.926,00	(420.623.926,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	22.436.204,00	(22.436.204,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	504.177.788,00	(504.177.788,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	15.849.793,00	(15.849.793,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	61.259.747,00	(61.259.747,00)	(100,00)
8.1.01.03.01.0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	1.014.999.998,00	(1.014.999.998,00)	(100,00)

8.1.01.03.01.0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	1.507.313.114,00	(1.507.313.114,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	0,00	13.482.000,00	(13.482.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	13.482.000,00	(13.482.000,00)	(100,00)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	4.209.035.726,00	2.120.269.897,00	2.088.765.829,00	98,51
8.1.02.01	Beban Barang	1.814.110.570,00	1.365.339.374,00	448.771.196,00	32,87
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	1.814.110.570,00	1.356.646.374,00	457.464.196,00	33,72
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.100.000,00	21.259.400,00	4.840.600,00	22,77
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	495.877.900,00	275.741.050,00	220.136.850,00	79,83
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.511.500,00	66.639.000,00	20.872.500,00	31,32
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	0,00	90.768.000,00	(90.768.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	574.501.170,00	521.820.924,00	52.680.246,00	10,10
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	750.000,00	990.000,00	(240.000,00)	(24,24)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75.973.000,00	36.926.000,00	39.047.000,00	105,74
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.972.000,00	3.192.000,00	(220.000,00)	(6,89)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	19.630.000,00	10.000.000,00	9.630.000,00	96,30
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	100.000.000,00	13.080.000,00	86.920.000,00	664,53
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	413.880.000,00	316.230.000,00	97.650.000,00	30,88
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	8.693.000,00	(8.693.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0123	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	1.728.000,00	(1.728.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0410	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.04.0411	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	6.715.000,00	(6.715.000,00)	(100,00)
8.1.02.02	Beban Jasa	2.212.029.028,00	392.092.143,00	1.819.936.885,00	464,16
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	1.993.072.070,00	386.152.143,00	1.606.919.927,00	416,14
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.230.000,00	5.110.000,00	22.120.000,00	432,88
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.609.770.975,00	287.450.000,00	1.322.320.975,00	460,02
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	100,00

8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	179.871.060,00	0,00	179.871.060,00	100,00
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.100.000,00	37.200.000,00	22.900.000,00	61,56
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	6.902.324,00	7.249.170,00	(346.846,00)	(4,78)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	0,00	512.500,00	(512.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.916.960,00	19.441.868,00	11.475.092,00	59,02
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.038.751,00	20.988.605,00	(949.854,00)	(4,53)
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	13.482.000,00	0,00	13.482.000,00	100,00
8.1.02.02.02	Beban luran Jaminan/Asuransi	420.000,00	1.440.000,00	(1.020.000,00)	(70,83)
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	186.665,00	635.760,00	(449.095,00)	(70,64)
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	233.335,00	804.240,00	(570.905,00)	(70,99)
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.456.958,00	0,00	16.456.958,00	100,00
8.1.02.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	9.696.960,00	0,00	9.696.960,00	100,00
8.1.02.02.04.0102	Beban Sewa Alat Ukur Lainnya	6.759.998,00	0,00	6.759.998,00	100,00
8.1.02.02.10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	197.580.000,00	0,00	197.580.000,00	100,00
8.1.02.02.10.0003	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	197.580.000,00	0,00	197.580.000,00	100,00
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	102.450.000,00	38.750.000,00	63.700.000,00	164,39
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.450.000,00	38.750.000,00	63.700.000,00	164,39
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	75.000.000,00	28.000.000,00	47.000.000,00	167,86
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	100,00
8.1.02.03.02.0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.250.000,00	10.750.000,00	2.500.000,00	23,26
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	100,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	80.446.128,00	324.088.380,00	(243.642.252,00)	(75,18)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.446.128,00	324.088.380,00	(243.642.252,00)	(75,18)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.676.128,00	91.608.380,00	(76.932.252,00)	(83,98)
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.770.000,00	232.480.000,00	(166.710.000,00)	(71,71)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.788.053.663,40	12.848.829.936,00	(7.060.776.272,60)	(54,95)
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.788.053.663,40	12.453.711.859,33	(6.665.658.195,93)	(53,52)
8.1.07.01.09	Beban Penyisihan Pajak Reklame	18.800,00	1.015.718,75	(996.918,75)	(98,15)
8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	18.800,00	1.015.718,75	(996.918,75)	(98,15)
8.1.07.01.12	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	112.981,00	(112.981,00)	(100,00)
8.1.07.01.12.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	112.981,00	(112.981,00)	(100,00)
8.1.07.01.15	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.788.034.863,40	12.452.583.159,58	(6.664.548.296,18)	(53,52)
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	5.788.034.863,40	12.452.583.159,58	(6.664.548.296,18)	(53,52)

8.1.07.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	395.118.076,67	(395.118.076,67)	(100,00)
8.1.07.02.02	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	0,00	395.118.076,67	(395.118.076,67)	(100,00)
8.1.07.02.02.0001	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	5.925.000,00	(5.925.000,00)	(100,00)
8.1.07.02.02.0002	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	0,00	179.795.416,67	(179.795.416,67)	(100,00)
8.1.07.02.02.0009	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	0,00	209.397.660,00	(209.397.660,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	28.660.985.799,40	27.885.738.838,00	775.246.961,40	2,78
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.885.738.838,00	342.691.687,00	623.490.021,16	181,94
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	896.830.596,39	283.909.894,00	612.920.702,39	215,89
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	205.328.571,43	101.179.612,00	104.148.959,43	102,93
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	205.328.571,43	63.428.572,00	141.899.999,43	223,72
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	37.751.040,00	(37.751.040,00)	(100,00)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	75.000,00	283.333,00	(208.333,00)	(73,53)
8.1.08.01.03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	0,00	208.333,00	(208.333,00)	(100,00)
8.1.08.01.03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	280.059.788,67	38.689.756,00	241.370.032,67	623,86
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.834.997,94	6.011.668,00	22.823.329,94	379,65
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.727.146,34	1.053.850,00	1.673.296,34	158,78
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	205.487.660,47	13.922.041,00	191.565.619,47	1.375,99
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.727.367,18	14.047.197,00	21.680.170,18	154,34
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.833.333,37	0,00	1.833.333,37	100,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	1.971.683,37	1.240.000,00	731.683,37	59,01
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	3.477.600,00	2.415.000,00	1.062.600,00	44,00
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	229.600,00	(229.600,00)	(100,00)
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	229.600,00	(229.600,00)	(100,00)
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	948.375,00	948.375,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	948.375,00	948.375,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	410.418.861,29	142.579.218,00	267.839.643,29	187,85

8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit- Personal Computer	148.893.912,69	49.177.373,00	99.716.539,69	202,77
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya	2.530.245,34	0,00	2.530.245,34	100,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	201.253.036,25	32.526.845,00	168.726.191,25	518,73
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	54.666.667,00	58.375.000,00	(3.708.333,00)	(6,35)
8.1.08.01.10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	575.000,01	0,00	575.000,01	100,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	62.004.461,77	51.410.550,00	10.593.911,77	20,61
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	61.444.461,77	50.850.550,00	10.593.911,77	20,83
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	45.309.632,21	35.042.382,00	10.267.250,21	29,30
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	932.000,00	932.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	225.380,00	225.380,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	2.104.200,00	2.055.766,00	48.434,00	2,36
8.1.08.02.01.0028	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	12.873.249,56	12.595.022,00	278.227,56	2,21
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas- Pagar	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	7.346.650,00	7.371.243,00	(24.593,00)	(0,33)
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	920.000,00	919.992,00	8,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	920.000,00	919.992,00	8,00	0,00
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	6.426.650,00	6.451.251,00	(24.601,00)	(0,38)
8.1.08.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik- Jaringan Distribusi	6.426.650,00	6.451.251,00	(24.601,00)	(0,38)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	966.181.708,16	342.691.687,00	623.490.021,16	181,94
	JUMLAH BEBAN	29.627.167.507,56	28.228.430.525,00	1.398.736.982,56	4,96
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	308,764,149,468,17	163.985.712.588,37	144.778.436.879,80	88,29
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
7.4.03	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
7.4.03.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
7.4.03.01.01	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
7.4.03.01.01.0001	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
	LO	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	112.471,00	576.677.888,48	(576.565.417,48)	(99,98)

	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85	144.201.871.462,32	87,63
POS LUAR BIASA					
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85	144.201.871.462,32	87,63

Kab. Lombok Tengah, 19 Februari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, SE., MM
 NIP. 197307291997032008



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	37.988.913.047,94	40.035.134.763,21
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	308.764.261.939,17	164.562.390.476,85
RK PPKD	(307.132.862.988,73)	(166.608.612.192,12)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(342.672,40)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(342.672,40)	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	39.619.969.325,98	37.988.913.047,94

Kab. Lombok Tengah, 19 Februari 2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAIQ ALUH WINDAYU WIRANOM, SE., MM

NIP.197307291997832008





INSPEKTORAT

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG KUASI

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan dibawah ini :

No	Nama	Jabatan
1	Lalu Yusuf Anshary	Wk. Penanggung jawab
2	Prayudia Wardani	Pengendali Teknis
3	Lalu Syamsul Hadi	Ketua
3	Subardan	Anggota
4	Lalu Nisban Ariwibowo	Anggota

Sesuai dengan surat perintah tugas nomor: 700/35/TT/INSP/2025 Tanggal 30 Desember 2025, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang Kuasi per tanggal 31 Desember 2025 kepada :

Nama Lengkap : Sumarni

Jabatan : Pengurus Barang pada Badan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

No	Nama Barng	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Karcis Retribusi Rawat Inap pada Puskesmas	123	Buku	3,250	399,750
2	Karcis Retribusi Rawat Jalan UGD pada Puskesmas	152	Buku	3,250	494,000
3	Karcis Retribusi Kunjungan pengobatan pada Puskesmas	134	Buku	3,250	435,500
4	Karcis Retribusi Parkir Alat Berat	855	Buku	4,000	3,420,000
5	Karcis Retribusi Parkir Mobil	740	Buku	2,800	2,072,000
6	Karcis Retribusi Parkir Sepeda Motor	948	Buku	4,000	3,792,000
7	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 50.000)	81	Buku	4,000	324,000
8	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 30.000)	90	Buku	4,000	360,000
9	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 20.000)	50	Buku	4,000	200,000
10	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 15.000)	35	Buku	4,000	140,000
11	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 10.000)	24	Buku	4,000	96,000
12	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 7.500)	51	Buku	4,000	204,000
13	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 5.000)	70	Buku	4,000	280,000
14	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 3.000)	178	Buku	4,000	712,000
15	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 2.000)	75	Buku	4,000	300,000
16	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 1.000)	75	Buku	4,000	300,000
17	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 500)	594	Buku	4,000	2,376,000
18	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 200)	1046	Buku	3,250	3,399,500
19	Karcis Retribusi Sampah (Rp. 100)	830	Buku	3,250	2,697,500
20	Karcis Retribusi RPH Betina Rp. 28.000	83	Buku	4,000	332,000
21	Karcis Retribusi RPH Jantan Rp. 23.000	133	Buku	4,000	532,000
22	Karcis Retribusi Jual Beli Ternak Besar Rp. 3.000	44	Buku	4,000	176,000
23	Karcis Retribusi Pemasukan Ternak Kecil	270	Buku	4,000	1,080,000
24	Karcis Retribusi Pasar Umum (Pink) Rp. 1.000	646	Buku	7,500	4,845,000
25	Karcis Retribusi Pasar Umum (Biru) Rp. 1.500	158	Buku	7,500	1,185,000

26	Karcis Retribusi Pasar Umum (Kuning) Rp. 2.000	89	Buku	7,500	667,500
27	Bill Rumah Makan/ Restoran	47	Buku	31,500	1,480,500
28	Kwitansi Satuan Kerja	125	Buku	15,000	1,875,000
29	Kwitansi TPR	96	Buku	15,000	1,440,000
30	Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP)	49	Buku	15,000	735,000
31	Buku Kas Umum	62	Buku	22,575	1,399,650
32	Surat Tanda Setoran (STS) PAD	124	Buku	82,200	10,192,800
33	Tanda Bukti Pembayaran (TBP)	29	Buku	82,200	2,383,800
34	Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD)	173	Buku	45,000	7,785,000
35	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	245	Buku	81,000	19,845,000
36	TTS Pajak BGGC	390	Buku	15,000	5,850,000
37	SSPD-BPHTB (Surat Setoran Pajak Daerah)	22	Buku	82,200	1,808,400
38	SPTPD-BPHTB (Surat pemberitahuan pajak daerah	170	Buku	40,000	6,800,000
39	Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)	37	Buku	81,000	2,997,000
40	Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)	19	Buku	82,200	1,561,800
41	STPD Pajak Hotel	55	Buku	45,000	2,475,000
42	STPD Pajak Restoran	52	Buku	45,000	2,340,000
43	SKPD-KB (Surat Ketetapan Pajak Daerah-Kurang Bayar)	6	Buku	35,000	210,000
44	SKPD-LB (Surat Ketetapan Pajak Daerah - Lebih Bayar)	14	Buku	35,000	490,000
45	STTS PBB - 12 (Surat Tanda Terima Sementara)	399	Buku	45,000	17,955,000
46	Kupon Undian PBB	2693	Buku	5,000	13,465,000
47	TPS PBB (Tanda Pembayaran Sementara)	360	Buku	81,000	29,160,000
48	STPT-PBB-P2 (Surat Tanda Pembayaran Tunggalan)	209	Buku	81,000	16,929,000
49	STS - PBB - P2 (Surat Tanda Setoran)	37	Buku	81,000	2,997,000
50	DPH-PBB-P2 (Daftar Penerimaan Harian)	186	Buku	82,200	15,289,200
51	Karcis masuk pengunjung Taman Wisata Aik Bukak Dewasa	255	Buku	7,500	1,912,500
52	Karcis masuk pengunjung Taman Wisata Aik Bukak Anak	285	Buku	7,500	2,137,500
53	Kwitansi Sedahan ke BKP	33	Buku	30,000	990,000
54	Kwitansi BKP ke Bendahara Khusus	24	Buku	30,000	720,000
55	BLANKO SPOP-PBB-P2	74	Buku	81,000	5,994,000
56	Blanko LSPOP (Lampiran Pemberitahuan Obyek Pajak)	121	Buku	81,000	9,801,000
57	Blanko Surat Pernyataan Wajib Pajak	39	Buku	45,000	1,755,000
58	Blanko Permohonan Pendaftaran Obyek Pajak Baru	30	Buku	45,000	1,350,000
59	Blanko Permohonan Mutasi Pecahan /sebagian Obyek PBB-P2	13	Buku	45,000	585,000
60	Blanko Permohonan Mutasi Gabung Obyek PBB-P2	13	Buku	45,000	585,000
61	Blanko perhitungan bersama SSPD-BPHTB	70	Buku	81,543	5,708,010
62	Kartu Tanda Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Sepeda Motor) Rp. 2.000	451	Buku	9,500	4,284,500
63	Kartu Tanda Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya) Rp. 3.000	528	Buku	10,000	5,280,000
64	Kartu Tanda Pembayaran Retribusi tempat khusus Parkir (Sepeda Motor)	535	Buku	9,500	5,082,500
65	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi tempat khusus parkir (Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya)	293	Buku	9,500	2,783,500
66	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi tempat khusus parkir (Mikro Bus, Bus, Truck sejenisnya)	100	Buku	10,000	1,000,000
67	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi tempat khusus parkir (Tronton, Trailer dan sejenisnya)	45	Buku	10,000	450,000
68	Karcis Tanda Pembayaran Retribusi Pasar Type A,/M2/Per Hari Rp. 2.500	107	Buku	7,500	802,500
69	Karcis Pasar Khusus Type A	1134	Buku	7,500	8,505,000
70	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perumahan (Rp. 5.000)	500	Buku	7,527	3,763,500

71	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perumahan (Rp. 3.000)	200	Buku	7,527	1,505,400
72	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perumahan (Rp. 2.000)	100	Buku	7,527	752,700
73	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 5.000)	50	Buku	7,527	376,350
74	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 10.000)	476	Buku	7,527	3,582,852
75	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 50.000)	20	Buku	7,527	150,540
76	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 30.000)	20	Buku	7,527	150,540
77	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 250.000)	15	Buku	7,527	112,905
78	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Perkantoran (Rp. 150.000)	20	Buku	7,527	150,540
79	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Rumah Makan (Rp. 7.500)	98	Buku	7,527	737,646
80	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Rumah Makan (Rp. 100.000)	19	Buku	7,527	143,013
81	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Rumah Makan (Rp. 4.000)	50	Buku	7,527	376,350
82	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 5.000)	63	Buku	7,527	474,201
83	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 10.000)	200	Buku	7,527	1,505,400
84	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 7.500)	47	Buku	7,527	353,769
85	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 15.000)	13	Buku	7,500	97,500
86	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 30.000)	8	Buku	7,500	60,000
87	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 3.000)	47	Buku	7,527	353,769
88	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pedagang (Rp. 9.000)	49	Buku	7,527	368,823
89	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pendidikan (Rp. 5.000)	191	Buku	7,527	1,437,657
90	Karcis Retribusi Persampahan untuk kelompok Pendidikan (Rp. 50.000)	12	Buku	7,527	90,324
TOTAL					274,553,689

Menyetujui
Pengurus Barang
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,


(Sumarni)

NIP. 19771231 200801 2 047

Mengetahui
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lombok Tengah,


(Baig Aluh Winda, S.P., SE., MM.)
NIP. 19730725 199703 2 008

Tim Pemeriksa :

1. Lalu Yusuf Anshary (Wakil Penanggung jawab)

2. Prayudia Wardani (Pengendalian Teknis)

3. Lalu Syamsul Hadi (Ketua)

4. Subardan (Anggota)

EVALUASI PENERIMAAN PBB PERKELURAHAN TAHUN 2025
LOMBOK TENGAH

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS POKOK

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

KEKAWAHAN/
KECAMATAN

REALISASI POKOK KETETAPAN
POKOK KETETAPAN

SISA POKOK KETETAPAN
TAHUN 2025

	TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025	
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH POKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT
(52.02.010) PRAYA BARAT								
(010) TANAK RARANG	777	41.296.656,00	403	22.448.980,00	54.4	22.448.980,00	54.4	374
(009) SELONG BELANAK	2.153	516.513.898,00	679	287.806.188,00	55.7	287.806.188,00	55.7	1.474
(001) MANGKUNG	3.800	153.642.904,00	1.276	46.169.169,00	30.0	46.169.169,00	30.0	2.524
(002) KATENG	3.281	95.189.108,00	1.718	44.521.881,00	46.8	44.521.881,00	46.8	1.563
(008) MEKARSARI	1.838	202.592.008,00	545	107.013.733,00	52.8	107.013.733,00	52.8	1.293
(004) SETANGGOR	1.738	85.080.254,00	1.221	56.890.185,00	66.9	56.890.185,00	66.9	517
(005) PENUJAK	3.890	640.919.080,00	1.612	232.568.350,00	36.3	232.568.350,00	36.3	2.278
(006) BATUJAI	6.118	366.295.298,00	3.609	222.841.485,00	60.8	222.841.485,00	60.8	2.509
(007) BANYU URIP	1.748	61.635.967,00	1.233	43.811.434,00	71.1	43.811.434,00	71.1	515
(003) BONDER	2.197	103.136.657,00	784	31.350.336,00	30.4	31.350.336,00	30.4	1.413
JumLah	27.540	2.266.301.830,00	13.080	1.095.421.741,00	48.3	1.095.421.741,00	48.3	14.460
(52.02.020) PUJUT								
(009) TUMPAK	1.678	252.082.664,00	669	86.923.563,00	34.5	86.923.563,00	34.5	1.009
(018) KERAME JATI	1.138	31.004.302,00	598	15.336.896,00	49.5	15.336.896,00	49.5	540
(016) BANGKET PARAK	2.589	80.990.064,00	1.510	38.753.309,00	47.8	38.753.309,00	47.8	1.079
(015) GAPURA	1.252	28.328.914,00	752	16.197.895,00	57.2	16.197.895,00	57.2	500
(014) MERTAK	5.161	690.960.796,00	1.651	444.932.029,00	64.4	444.932.029,00	64.4	3.510
(013) PENGENGAT	2.248	66.971.350,00	1.255	35.546.374,00	53.1	35.546.374,00	53.1	993
(012) SEGALA ANYAR	1.262	36.001.056,00	794	21.486.930,00	59.7	21.486.930,00	59.7	488
(011) SUKADANA	2.815	145.471.279,00	1.717	96.146.457,00	66.1	96.146.457,00	66.1	1.098
(010) PRABU	1.735	261.927.612,00	954	101.379.212,00	38.7	101.379.212,00	38.7	781
(017) DADAP	1.252	42.919.245,00	704	23.462.361,00	54.7	23.462.361,00	54.7	548
(008) TANAGAMU	2.130	76.161.594,00	763	27.142.851,00	35.6	27.142.851,00	35.6	1.367
(007) KETARA	1.539	1.555.383.780,00	467	1.494.158.708,00	96.1	1.494.158.708,00	96.1	1.072
(006) KAWO	3.784	92.544.164,00	2.516	60.587.221,00	65.5	60.587.221,00	65.5	1.268
(005) TEROWAI	2.480	62.504.214,00	1.531	36.465.255,00	58.3	36.465.255,00	58.3	949
(001) PENGEMBUR	1.898	74.127.528,00	1.053	38.501.808,00	51.9	38.501.808,00	51.9	845
(002) KUTA	3.425	1.574.238.015,00	1.573	1.401.416.180,00	89.0	1.401.416.180,00	89.0	1.852
(003) REMBITAN	2.181	138.927.505,00	672	37.208.980,00	26.8	37.208.980,00	26.8	1.509
(004) SENGKOL	4.142	1.019.624.400,00	1.518	763.800.657,00	74.9	763.800.657,00	74.9	2.624
JumLah	42.709	6.230.168.482,00	20.697	4.739.446.686,00	76.1	4.739.446.686,00	76.1	22.012

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

REALISASI FOKOK KETETAPAN

TAHUN 2025

KECAMATAN

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS POKOK

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

REALISASI FOKOK KETETAPAN

TAHUN 2025

SISA POKOK KETETAPAN

	TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025	
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH POKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT
(52.02.030) PRAVA TIMUR								
(008) KIDANG	3.619	71.731.303,00	1.812	33.881.405,00	47.2	33.881.405,00	47.2	1.807
(007) SUKARAJA	1.818	85.722.488,00	1.138	49.002.307,00	57.2	49.002.307,00	57.2	680
(006) BELEKA	1.045	23.771.063,00	160	3.639.774,00	15.3	3.639.774,00	15.3	885
(005) MUJUR	2.844	213.183.955,00	1.555	107.598.192,00	50.5	107.598.192,00	50.5	1.289
(004) SENGKERANG	2.911	148.900.404,00	1.812	83.827.311,00	56.3	83.827.311,00	56.3	1.099
(003) GANTI	2.229	55.815.598,00	1.172	27.066.790,00	48.5	27.066.790,00	48.5	1.057
(013) BELEKE DAYE	1.385	33.535.098,00	671	13.846.741,00	41.3	13.846.741,00	41.3	714
(001) MARONG	2.035	71.635.068,00	393	14.058.589,00	19.6	14.058.589,00	19.6	1.642
(014) JERO PURI	1.555	41.159.566,00	1.057	28.380.657,00	69.0	28.380.657,00	69.0	498
(011) PENGONAK	780	24.275.278,00	338	10.178.718,00	41.9	10.178.718,00	41.9	442
(010) BELELANDO	1.472	36.917.206,00	1.141	24.349.435,00	66.0	24.349.435,00	66.0	331
(009) LANDAH	2.674	72.420.754,00	1.926	51.869.295,00	71.6	51.869.295,00	71.6	748
(012) BELEKE LEBE SANE	1.190	26.232.100,00	168	3.314.611,00	12.6	3.314.611,00	12.6	1.022
(002) SEMOYANG	2.920	71.744.870,00	1.839	44.580.536,00	62.1	44.580.536,00	62.1	1.081
Jumlah	28.477	977.044.751,00	15.182	495.594.361,00	50.7	495.594.361,00	50.7	13.295
(52.02.040) JANAPRIA								
(001) LOANG WAKA	1.381	59.671.528,00	937	38.864.823,00	65.1	38.864.823,00	65.1	444
(002) LEKOR	3.041	126.259.907,00	2.259	92.064.029,00	72.9	92.064.029,00	72.9	782
(003) SABA	861	32.461.162,00	497	17.707.901,00	54.6	17.707.901,00	54.6	364
(004) JANAPRIA	2.547	143.119.666,00	1.823	90.510.909,00	63.2	90.510.909,00	63.2	724
(005) PENDEM	2.687	49.015.682,00	2.285	40.890.638,00	83.4	40.890.638,00	83.4	402
(006) DURJAN	1.026	32.910.779,00	813	23.958.260,00	72.8	23.958.260,00	72.8	213
(007) LANGKO	1.499	35.362.834,00	687	15.092.876,00	42.7	15.092.876,00	42.7	812
(008) BAKAN	1.601	56.205.520,00	1.043	35.944.567,00	64.0	35.944.567,00	64.0	558
(009) SELEBUNG REMBIGA	1.513	33.733.860,00	1.203	26.993.265,00	80.0	26.993.265,00	80.0	310
(010) KEREMBONG	1.576	42.018.453,00	1.305	32.589.273,00	77.6	32.589.273,00	77.6	271
(011) JANGO	1.264	38.664.840,00	939	28.489.136,00	73.7	28.489.136,00	73.7	325
(012) SETUTA	1.262	32.118.107,00	1.016	24.697.433,00	76.9	24.697.433,00	76.9	246
(016) PRAKO	894	37.032.179,00	449	16.089.515,00	43.4	16.089.515,00	43.4	445
(013) JANGAWANA	683	26.615.843,00	483	17.916.654,00	67.3	17.916.654,00	67.3	200
(014) LINGKOK BERENGE	900	28.903.949,00	753	23.500.806,00	81.3	23.500.806,00	81.3	147
(015) TIBU SISOK	1.052	32.956.432,00	599	19.738.272,00	59.9	19.738.272,00	59.9	453
Jumlah	23.787	807.050.741,00	17.091	545.048.357,00	67.5	545.048.357,00	67.5	6.696

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

KELURAHAN/

KECAMATAN

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS,SUDAH LUNAS,SUDAH LUNAS

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

SISA FOKOK KETETAPAN

TAHUN 2025

	TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH FOKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT	JUMLAH SISA FOKOK
(52.02.050) KOPANG									
(001) MINCIAN	1.974	140.415.130,00	1.260	87.697.807,00	62.5	87.697.807,00	62.5	714	52.717.323,00
(012) PAJANGAN	867	42.836.147,00	554	25.326.397,00	59.1	25.326.397,00	59.1	313	17.509.750,00
(003) DARMAJI	1.905	147.239.099,00	1.216	86.351.447,00	58.6	86.351.447,00	58.6	689	60.887.652,00
(004) DASAN BARU	2.280	112.470.887,00	1.139	54.435.828,00	48.4	54.435.828,00	48.4	1.141	58.035.059,00
(005) KOPANG REMBICA	2.822	200.005.248,00	1.433	91.147.523,00	45.6	91.147.523,00	45.6	1.389	108.857.725,00
(006) MONTONG GAMANG	3.882	188.461.688,00	2.416	115.905.592,00	61.5	115.905.592,00	61.5	1.466	72.556.096,00
(007) LENDANGARA	1.970	80.987.535,00	1.626	66.792.887,00	82.5	66.792.887,00	82.5	344	14.194.648,00
(008) BEBUAK	2.654	131.832.225,00	1.832	90.642.800,00	68.8	90.642.800,00	68.8	822	41.189.425,00
(009) WAJASESANG	3.424	126.345.868,00	2.323	82.180.293,00	65.0	82.180.293,00	65.0	1.101	44.165.575,00
(010) SEMPARU	509	26.457.097,00	404	19.972.786,00	75.5	19.972.786,00	75.5	105	6.484.311,00
(011) AIQ HUAL	1.165	31.676.661,00	660	17.735.829,00	56.0	17.735.829,00	56.0	505	13.940.832,00
(002) MONGGAS	2.322	153.340.901,00	1.507	92.669.738,00	60.4	92.669.738,00	60.4	815	60.671.163,00
(013) BERINDING	1.937	114.866.578,00	1.053	64.246.255,00	55.9	64.246.255,00	55.9	884	50.620.323,00
Jumlah	27.711	1.496.935.064,00	17.423	895.105.182,00	59.8	895.105.182,00	59.8	10.288	601.829.882,00

(52.02.060) PRAJA

(003) SEMAYAN	1.066	67.412.586,00	732	48.770.005,00	72.3	48.770.005,00	72.3	334	18.642.581,00
(001) LENENG	3.079	239.906.627,00	1.752	130.655.956,00	54.5	130.655.956,00	54.5	1.327	109.250.671,00
(005) GERUNUNG	2.053	97.325.450,00	852	48.563.660,00	49.9	48.563.660,00	49.9	1.201	48.761.790,00
(006) TAGO	3.337	171.125.282,00	1.719	78.219.974,00	45.7	78.219.974,00	45.7	1.618	92.905.308,00
(007) AIKWUAL	1.392	67.487.266,00	520	24.853.449,00	36.8	24.853.449,00	36.8	872	42.633.817,00
(008) MONTONG TEREP	2.517	130.119.638,00	934	43.925.478,00	33.8	43.925.478,00	33.8	1.583	86.194.160,00
(009) MERTAK TOMBOK	1.378	66.173.115,00	816	32.354.104,00	48.9	32.354.104,00	48.9	562	33.819.011,00
(010) TIWUGALIH	2.513	128.514.502,00	1.375	61.919.974,00	48.2	61.919.974,00	48.2	1.138	66.594.528,00
(011) PRAPEN	2.081	154.906.493,00	1.008	63.518.098,00	41.0	63.518.098,00	41.0	1.073	91.388.395,00
(012) RENTENG	1.748	120.822.320,00	856	58.700.143,00	48.6	58.700.143,00	48.6	892	62.122.177,00
(013) PANISARI	1.186	91.957.011,00	760	52.409.742,00	57.0	52.409.742,00	57.0	426	39.547.269,00
(014) GONJAK	1.491	64.253.693,00	734	31.928.227,00	49.7	31.928.227,00	49.7	757	32.325.466,00
(015) MEKAR DAMAI	1.340	63.433.333,00	838	37.516.510,00	59.1	37.516.510,00	59.1	502	25.916.823,00
(004) BUNUT BAKO	3.233	130.351.481,00	1.324	52.730.862,00	40.5	52.730.862,00	40.5	1.909	77.620.619,00
(002) PRAJA	2.461	252.333.158,00	1.239	134.363.559,00	53.2	134.363.559,00	53.2	1.222	117.969.599,00
Jumlah	30.875	1.846.121.965,00	15.459	900.429.741,00	48.8	900.429.741,00	48.8	15.416	945.692.224,00

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

KELURAHAN/ KECAMATAN

REALISASI POKOK KETETAPAN

SISA POKOK KETETAPAN

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS POKOK

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

REALISASI POKOK KETETAPAN

SISA POKOK KETETAPAN

TAHUN 2025

TAHUN 2025

TAHUN 2025

TAHUN 2025

	TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025			
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH POKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT	JUMLAH SISA POKOK	%
(52.02.070) JONGGAT										
(003) PUJUNG	4.633	353.407.002,00	2.070	150.010.738,00	42.4	150.010.738,00	42.4	2.563	203.396.264,00	57.6
(001) LABULIA	3.906	476.390.832,00	1.152	131.897.757,00	27.7	131.897.757,00	27.7	2.754	344.493.075,00	72.3
(005) BATUTULIS	1.095	100.113.431,00	826	68.151.533,00	68.1	68.151.533,00	68.1	269	31.961.898,00	31.9
(006) JELANTIK	4.098	393.905.169,00	1.944	190.885.628,00	48.5	190.885.628,00	48.5	2.154	203.019.541,00	51.5
(007) UBUNG	3.433	263.895.655,00	2.043	158.766.627,00	60.2	158.766.627,00	60.2	1.390	105.129.028,00	39.8
(008) BONJERUK	3.050	240.163.460,00	1.725	133.708.800,00	55.7	133.708.800,00	55.7	1.325	106.454.660,00	44.3
(009) PERINA	1.231	74.952.446,00	822	50.416.455,00	67.3	50.416.455,00	67.3	409	24.535.991,00	32.7
(010) BAREJULAT	2.849	160.293.290,00	1.881	98.545.123,00	61.5	98.545.123,00	61.5	968	61.748.167,00	38.5
(011) PENGENJEK	2.837	177.785.246,00	1.069	65.273.868,00	36.7	65.273.868,00	36.7	1.768	112.511.378,00	63.3
(012) BUNKATE	1.647	100.419.242,00	1.234	76.228.350,00	75.9	76.228.350,00	75.9	413	24.190.892,00	24.1
(013) GEMEL	1.963	63.451.380,00	1.471	44.663.726,00	70.4	44.663.726,00	70.4	492	18.787.654,00	29.6
(004) NYEROT	2.410	168.515.818,00	1.663	107.921.421,00	64.0	107.921.421,00	64.0	747	60.594.397,00	36.0
(002) SUKABARA	3.647	366.821.909,00	2.481	238.481.605,00	65.0	238.481.605,00	65.0	1.166	128.340.304,00	35.0
Jumlah	36.799	2.940.114.880,00	20.381	1.514.951.631,00	51.5	1.514.951.631,00	51.5	16.418	1.425.163.249,00	48.5
(52.02.080) PRINGGARATA										
(003) SINTUNG	2.647	93.578.009,00	1.269	40.645.392,00	43.4	40.645.392,00	43.4	1.378	52.932.617,00	56.6
(001) BILABANTE	1.257	104.397.784,00	809	64.126.590,00	61.4	64.126.590,00	61.4	448	40.271.194,00	38.6
(005) MURBAYA	1.877	40.969.268,00	560	10.746.298,00	26.2	10.746.298,00	26.2	1.317	30.222.970,00	73.8
(006) FEMEPEK	2.629	135.709.343,00	1.459	79.528.335,00	58.6	79.528.335,00	58.6	1.170	56.181.008,00	41.4
(007) SEPAKAK	2.271	103.136.785,00	1.451	70.001.224,00	67.9	70.001.224,00	67.9	820	33.135.561,00	32.1
(008) SISIK	1.913	60.884.563,00	1.183	38.716.528,00	63.6	38.716.528,00	63.6	730	22.168.035,00	36.4
(009) TAMAN INDAH	1.855	76.900.599,00	1.334	53.196.964,00	69.2	53.196.964,00	69.2	521	23.703.635,00	30.8
(010) ARJANGKA	2.330	76.200.795,00	1.391	42.401.667,00	55.6	42.401.667,00	55.6	939	33.799.128,00	44.4
(011) MENENENG	1.333	90.290.197,00	856	53.587.874,00	59.4	53.587.874,00	59.4	477	36.702.323,00	40.6
(004) PRINGGARATA	3.370	183.026.766,00	1.955	98.085.554,00	53.6	98.085.554,00	53.6	1.415	84.941.212,00	46.4
(002) BAGU	2.030	107.656.481,00	1.058	50.889.419,00	47.3	50.889.419,00	47.3	972	56.767.062,00	52.7
Jumlah	23.512	1.072.750.590,00	13.325	601.925.845,00	56.1	601.925.845,00	56.1	10.187	470.824.745,00	43.9
(52.02.090) BATUKLIANG										
(003) BARABALI	4.677	208.800.228,00	2.841	119.399.906,00	57.2	119.399.906,00	57.2	1.836	89.400.322,00	42.8
(004) BUJAK	3.721	134.555.432,00	2.510	88.275.854,00	65.6	88.275.854,00	65.6	1.211	46.279.578,00	34.4
(005) PERESAK	2.745	109.385.562,00	1.456	57.015.876,00	52.1	57.015.876,00	52.1	1.289	52.369.686,00	47.9
(006) MANTANG	2.507	158.983.625,00	1.334	76.340.635,00	48.0	76.340.635,00	48.0	1.173	82.642.990,00	52.0

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

KELURAHAN/

KECAMATAN

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS POKOK

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

SISA POKOK KETETAPAN

TAHUN 2025

	TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025		TAHUN 2025	
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH POKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT
(007) SELEBUNG	2.742	102.512.267,00	1.506	46.815.746,00	45.7	46.815.746,00	45.7	1.236
(001) BEBER	1.245	41.941.121,00	837	27.147.058,00	64.7	27.147.058,00	64.7	408
(009) TAMPAK SIRING	1.936	67.791.638,00	1.265	42.185.761,00	62.2	42.185.761,00	62.2	671
(010) MEKAR BERSATU	598	45.128.114,00	288	23.398.540,00	51.8	23.398.540,00	51.8	310
(011) LENDANG TAMPEL	1.459	54.997.109,00	1.083	40.402.274,00	73.5	40.402.274,00	73.5	376
(002) PAGUTAN	2.539	159.072.996,00	1.262	80.874.676,00	50.8	80.874.676,00	50.8	1.277
(008) ALO DAREO	2.710	129.317.608,00	1.386	65.539.507,00	50.7	65.539.507,00	50.7	1.324
Jumlah	26.879	1.212.485.700,00	15.768	667.395.833,00	55.0	667.395.833,00	55.0	11.111
(52.02.100) PRAYA TENGAH								
(001) JONTLAK	1.828	112.173.027,00	1.252	74.892.950,00	66.8	74.892.950,00	66.8	576
(002) LAJUT	3.707	188.302.625,00	2.412	107.473.472,00	57.1	107.473.472,00	57.1	1.295
(013) LELONG	1.092	53.572.179,00	934	45.754.692,00	85.4	45.754.692,00	85.4	158
(012) DAKUNG	1.138	49.975.671,00	873	37.109.442,00	74.3	37.109.442,00	74.3	265
(011) PRAI MEKE	1.037	171.659.337,00	929	154.483.758,00	90.0	154.483.758,00	90.0	108
(010) GERANTUNG	1.358	109.648.837,00	1.238	102.070.961,00	93.1	102.070.961,00	93.1	120
(009) SARAKE	1.189	76.218.490,00	976	57.220.549,00	75.1	57.220.549,00	75.1	213
(008) JURANG JALER	1.080	179.629.545,00	670	107.039.411,00	59.6	107.039.411,00	59.6	410
(007) PENGADANG	2.533	332.566.607,00	1.720	219.129.197,00	65.9	219.129.197,00	65.9	813
(006) BERATM	1.345	63.436.591,00	658	31.343.615,00	49.4	31.343.615,00	49.4	687
(005) KELEBUH	1.566	71.297.589,00	1.251	57.677.891,00	80.9	57.677.891,00	80.9	315
(004) PEJANGGIK	2.364	135.896.813,00	1.385	70.835.648,00	52.1	70.835.648,00	52.1	979
(003) BATUNYALA	2.444	206.234.411,00	1.602	118.890.140,00	57.6	118.890.140,00	57.6	842
Jumlah	22.681	1.750.611.722,00	15.900	1.183.921.726,00	67.6	1.183.921.726,00	67.6	6.781
(52.02.110) PRAYA BARAT DAYA								
(002) KABUL	1.699	77.545.879,00	837	38.135.108,00	49.2	38.135.108,00	49.2	862
(012) PANDAN TINGGANG	587	52.593.135,00	268	23.766.835,00	45.2	23.766.835,00	45.2	319
(004) RANGGAGATA	1.778	111.487.361,00	606	39.667.619,00	35.6	39.667.619,00	35.6	1.172
(005) UNGGA	1.996	126.863.848,00	853	65.697.088,00	51.8	65.697.088,00	51.8	1.143
(006) DAREK	4.214	197.967.970,00	1.979	87.768.496,00	44.3	87.768.496,00	44.3	2.235
(007) PANDAN INDAH	1.805	90.897.897,00	820	43.094.521,00	47.4	43.094.521,00	47.4	985
(008) SERAGE	1.074	62.167.894,00	632	35.571.047,00	57.2	35.571.047,00	57.2	442
(009) TEDUH	718	27.673.734,00	549	20.686.972,00	74.8	20.686.972,00	74.8	169
(001) MONTONG SAPIH	1.344	97.422.023,00	620	49.539.149,00	50.9	49.539.149,00	50.9	724
(003) PELAMBIK	2.672	97.234.962,00	1.399	48.168.277,00	49.5	48.168.277,00	49.5	1.273

Generated at : 25/02/2026 14:50:56 WITA

Halaman : 5 dari 6

Tanggal Penerimaan : 01/01/2025 s.d. 31/12/2025

Ketetapan Golongan 1,2,3,4,5

KELUARAN/ KECAMATAN

Status Pembayaran SPPT : BELUM LUNAS, SUDAH LUNAS, SUDAH LUNAS POOK

Pekerjaan Subjek Pajak : SEMUA

SISA POKOK KETETAPAN

	TAHUN 2025				TAHUN 2025					
	SPPT	JUMLAH (Rp)	SPPT	JUMLAH POKOK PENERIMAAN (Rp)	%	JUMLAH PENERIMAAN (Rp)	%	SPPT	JUMLAH SISA POKOK	%
(010) BATU JANGKIH	1.208	85.130.382,00	608	31.605.103,00	48.5	31.605.103,00	48.5	600	33.525.279,00	51.5
(011) MONTONG AJAN	1.620	130.334.894,00	726	55.727.515,00	42.8	55.727.515,00	42.8	894	74.607.379,00	57.2
Jumlah	20.715	1.137.319.979,00	9.897	539.427.730,00	47.4	539.427.730,00	47.4	10.818	597.892.249,00	52.6
(52.02.120) BATUKLIANG UTARA										
(005) TANAK BEAQ	2.119	136.325.909,00	875	53.464.034,00	39.2	53.464.034,00	39.2	1.244	82.861.875,00	60.8
(004) SETILING	1.797	104.212.219,00	1.300	74.363.469,00	71.4	74.363.469,00	71.4	497	29.848.750,00	28.6
(003) AIK BURAQ	3.366	174.325.855,00	2.268	104.291.441,00	59.8	104.291.441,00	59.8	1.098	70.034.414,00	40.2
(002) AIK BERTIQ	2.087	121.435.425,00	1.366	73.831.531,00	60.8	73.831.531,00	60.8	721	47.603.894,00	39.2
(001) TERATAK	3.302	156.873.233,00	2.271	97.590.899,00	62.2	97.590.899,00	62.2	1.031	59.282.334,00	37.8
(006) KARANG SIDEMEN	1.834	92.612.637,00	1.293	65.027.158,00	70.2	65.027.158,00	70.2	541	27.585.479,00	29.8
(007) LANTAN	2.037	70.064.747,00	1.317	41.862.758,00	59.7	41.862.758,00	59.7	720	28.201.989,00	40.3
(008) MAS-MAS	1.674	69.194.255,00	945	36.700.221,00	53.0	36.700.221,00	53.0	729	32.494.034,00	47.0
Jumlah	18.216	925.044.280,00	11.635	547.131.511,00	59.1	547.131.511,00	59.1	6.581	377.912.789,00	40.9
(52.02.999) LUAR DAERAH										
(999) LUAR DAERAH	0	0,00	0	0,00	0.0	0,00	0.0	0	0,00	0.0
Jumlah	0	0,00	0	0,00	0.0	0,00	0.0	0	0,00	0.0
Jumlah Total	329.901	22.661.949.984,00	185.838	13.725.800.344,00	60.6	13.725.800.344,00	60.6	144.063	8.936.149.640,00	39.4